



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BALANGAN**

Jl. Jend. A. Yani Km. 1 Paringin Kota Telp/faks. (0526) 2028114
Kode Pos 71662

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026

**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BALANGAN**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	9
2.1.1 Tugas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	9
2.1.2 Fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	10
2.1.3 Struktur Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	12
2.2 Sumber Daya Manusia SKPD	35
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD	37
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	55
2.4.1 Tantangan yang dihadapi	54
2.4.2 Peluang	57
2.5 Faktor Kunci Keberhasilan	58
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	59
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	59
3.1.1 Permasalahan Investasi Daerah Kabupaten Balangan	59
3.1.2 Permasalahan Transmigrasi dan Tenaga Kerja	61

3.2 Telaahan terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah	64
3.2.1 Visi	64
3.2.2 Misi	64
3.3 Telaahan Visi dan Misi RPJM Daerah 2021 – 2026	65
3.4 Telaahan Renstra	66
3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	66
3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis	68
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	72
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	72
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	74
5.1 Strategi	74
5.2 Kebijakan	74
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	77
6.1 Rencana Program dan Kegiatan	77
6.2 Pendanaan Indikatif	83
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	84
7.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	84
BAB VIII PENUTUP	86
Lampiran	

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT atas berkah dan karunia-Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan tahun 2021 -2026 dapat disusun sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. dengan mengacu kepada Undang Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU-SPPN) yang telah dijabarkan secara teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026 merupakan salah satu tahapan dari Perencanaan Pembangunan Daerah secara keseluruhan untuk periode 5 (tahun) tahun yang menjadi bahan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 - 2026.

Akhirnya penghargaan dan ucapan terima kasih yang tiada terhingga disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kerjasamanya sehingga tersusunnya Rencana Strategis Perubahan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026 ini. Kami menyadari ini masih perlu penyempurnaan. Walau demikian, besar harapan semoga Rencana Strategis Perubahan ini bermanfaat sebagai upaya peningkatan kinerja pelaksanaan program pembangunan di masa mendatang. Demi kesempurnaan Rencana Strategis Perubahan ini untuk meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan, kami menerima kritikan dan saran yang membangun.

Parangin, Agustus 2021

**Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga
Kerja Kabupaten Balangan**



H. ABIJI, S.Pd, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19690813 199412 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan salah satu langkah ke depan pelaksanaan paradigma baru pemerintah menuju pemerintahan yang demokratis, tidak sentralistik, tidak otoritik, dan mengarah pada terciptanya tata pemerintahan yang baik atau Good Governance.

Otonomi daerah pada hakekatnya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka pengembangan inisiatif, prakarsa, dan kreatifitas serta inovasi agar sumber daya yang ada dapat dikelola sebaik-baiknya dalam rangka meningkatkan pelayanan prima.

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang prima merupakan akar kebijakan pemerintah Kabupaten Balangan dalam membentuk Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan Berangkat dari keinginan pemerintah memberikan pelayanan yang prima, maka dengan berdirinya SKPD ini cakupan beberapa pelayanan perizinan dapat dilayani pada satu tempat dengan menerapkan konsep terpadu satu pintu.

Untuk lebih meningkatkan pelayanan dalam rangka memberikan kepuasan dan pelayanan yang diinginkan masyarakat tentunya Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan akan berusaha meningkatkan kinerja yang diawali dengan perencanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan dalam rencana strategis.

Rencana Strategis adalah rencana yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (Lima) tahun ke depan, dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada atau mungkin timbul, dikaitkan dengan Visi, Misi dan Nilai-nilai organisasi serta faktor-faktor kunci keberhasilan. Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan tahun 2021 – 2026 berpedoman pada RPJMD kabupaten Balangan tahun 2021 - 2026 yang

merupakan penjabaran dari Visi, Misi Bupati Balangan terpilih untuk periode tersebut.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 ini disusun dengan landasan hukum peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kab. Tanah Bumbu dan Kab. Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Lembaran Negara Nomor 4663).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
 11. Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan PUG dan Focus Kepada Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540).
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1447).
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16).
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2021.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032 (Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 95).
22. Peraturan Daerah Kab. Balangan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2018).
23. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan
24. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021 – 2026.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. (Berita Daerah Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2021).

26. Peraturan Bupati Kabupaten Balangan Nomor 81 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 adalah penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi :

1. Penjabaran Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Balangan Tahun 2021-2026 ke dalam program prioritas pembangunan daerah berdasarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan periode lima tahun ke depan.
2. Penjabaran program prioritas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan yang dalam penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan.
3. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan.

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan :

1. Menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja/Tapkin Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
2. Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LKIP);
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima tahun kedepan;
4. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergitas antara Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Renstra ini terdiri dari :

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

(Latar belakang penyusunan Renstra SKPD, pengertian Renstra SKPD dan proses penyusunan Renstra SKPD)

1.2. Landasan Hukum

(Undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan lainnya)

1.3. Maksud dan Tujuan

(Menjelaskan maksud serta tujuan penyusunan Renstra SKPD, menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja (Renja) SKPD)

1.4. Sistematika Penulisan

(Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD ini)

Bab II Gambaran Pelayanan SKPD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui renstra sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD dan mengulas hambatan-hambatan utama yang dihadapi.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Memuat tentang dasar hukum pembentukan SKPD, Struktur organisasi serta uraian tugas pokok dan fungsi

2.2. Sumber Daya SKPD

Memuat penjelasan tentang sumber daya yang dimiliki SKPD

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan target Renstra SKPD

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan dan pelayanan SKPD

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Menjelaskan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam periode 5 tahun.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isi-Isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Visi dan Misi disesuaikan dengan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD; tujuan dan sasaran SKPD

4.1 Tujuan

4.2 Sasaran

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Menjelaskan Strategi dan Kebijakan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dengan berpedoman pada tujuan sasaran strategi dan kebijakan RPJMD

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Menjelaskan Rencana program, kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif berdasarkan :

- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu dengan berpedoman pada program, kegiatan, indikator kinerja pada RPJMD.

- b. Program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD serta disesuaikan dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat.
- c. Program, Kegiatan dan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana.
- d. Penentuan lokasi kegiatan dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang yang ditetapkan
- e. Sumber pendanaan pembangunan daerah terdiri atas anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Menjelaskan ringkasan Renstra serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan SKPD dalam mengimplementasikan Renstra.

Bab VIII Penutup

- Lampiran

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan dibentuk sebagai Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, transmigrasi dan tenaga kerja di lingkup Kabupaten Balangan. Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan juga berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Pemetaan Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Penanaman Modal, dimana membentuk susunan struktur organisasi yang berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas pokok kedinasan. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan selaku aparat Pelayanan Publik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Pelayanan Publik di bidang perizinan dan nonperizinan. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan melayani 96 perizinan dan non perizinan meliputi 92 perizinan dan 4 non perizinan.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

2.1.1 Tugas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Balangan Nomor 81 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengembangan iklim

penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal, melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian, pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, serta perencanaan, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah disebutkan bahwa Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal, melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian, pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, serta perencanaan, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah

2.1.2 Fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Adapun Fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal, melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian, pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, serta perencanaan, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal, melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian, pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, serta perencanaan, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal, melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian, pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, serta perencanaan, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
4. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- a. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengembangan iklim, promosi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha, pengaduan, pengolahan data sistem informasi penanaman modal, perencanaan dan penempatan tenaga kerja, pembinaan pelatihan kerja, produktivitas dan hubungan industrial, serta transmigrasi;
- b. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengembangan iklim, promosi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- c. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha;

- d. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaduan, pengolahan data sistem informasi penanaman modal;
- e. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan dan penempatan tenaga kerja;
- f. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan pelatihan kerja, produktivitas dan hubungan industrial;
- g. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang transmigrasi;
- h. Membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2.1.3 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terorganisasi dalam struktural jabatan yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal;
 - b. Seksi Promosi Penanaman Modal;
 - c. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
4. Bidang Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan Perizinan Berusaha I;
 - b. Seksi Pelayanan Perizinan Berusaha II; dan
 - c. Seksi Pelayanan Perizinan Non Berusaha.
5. Bidang Pengaduan, Pengolahan Data Sistem Informasi Penanaman Modal terdiri dari :
 - a. Seksi Pengaduan dan Konsultasi Perizinan;

- b. Seksi Data dan Kearsipaan Perizinan;
 - c. Seksi Pengelolaan Sistem Informasi.
6. Bidang Perencanaan dan Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan;
 - b. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
 - c. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja
 7. Bidang Pembinaan Pelatihan Kerja, Produktivitas dan Hubungan Industrial:
 - a. Seksi Pelatihan Kerja dan Kelembagaan
 - b. Seksi Produktivitas Tenaga Kerja;
 - c. Seksi Hubungan Industrial
 8. Bidang Transmigrasi
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
 - b. Seksi Pembangunan Kawasan Transmigrasi;
 9. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 10. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas dan Fungsi yang dibebankan kepada unsur organisasi adalah sebagai berikut :

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian.

1. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan Dinas;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga Dinas;

- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset Dinas;
 - f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat Dinas; dan
 - g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:
- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan Dinas;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga Dinas;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset Dinas;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat Dinas;
 - g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.

2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan Dinas;
 - b. menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan sesuai kebutuhan;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategis;
 - d. menyiapkan bahan dan mengevaluasi kegiatan program dan rencana kegiatan;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi sesuai kebutuhan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun bahan Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan program; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
1. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
 - d. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan pertanggung jawaban keuangan;
 - f. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun

eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian Dinas;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat dan ekspedisi;
 - d. menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
 - e. menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggaan, mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;
 - f. menyiapkan bahan, dan melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU);
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aset;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan laporan penatausahaan aset;
 - i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pengelolaan aset;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - k. menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;

- l. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
- o. menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;
- p. menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;
- q. menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
- r. menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya

Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

- (1) Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan dan pengembangan penanaman modal, promosi penanaman modal, serta pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
- (2) Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada, Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian perencanaan dan pengembangan penanaman modal;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian promosi penanaman modal; dan
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut :
 - a. menyusun kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan penanaman modal, promosi penanaman modal, serta pengendalian pelaksanaan penanaman modal;

- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan perencanaan dan pengembangan penanaman modal;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan promosi penanaman modal;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan penanaman modal; dan
- e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal;
 - b. Seksi Promosi Penanaman Modal; dan
 - c. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- (1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi perencanaan dan pengembangan penanaman modal.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan perencanaan dan pengembangan penanaman modal;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perencanaan dan pengembangan penanaman modal;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis perencanaan dan pengembangan penanaman modal;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi perencanaan dan pengembangan penanaman modal;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengawasan perencanaan dan pengembangan penanaman modal;
 - f. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan dan pengawasan perencanaan dan pengembangan penanaman modal; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

- (1) Seksi Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi terkait promosi penanaman modal.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan promosi penanaman modal;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data promosi penanaman modal;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis promosi penanaman modal;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi promosi penanaman modal;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengawasan promosi penanaman modal;
 - f. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja promosi penanaman modal; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

- (1) Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pengendalian pelaksanaan penanaman modal;

- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengendalian pelaksanaan penanaman modal; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha

- (1) Bidang Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada, Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Bencana mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelayanan perizinan berusaha I;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelayanan perizinan berusaha II; dan
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelayanan perizinan non berusaha.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun kebijakan teknis pelayanan perizinan berusaha I, pelayanan perizinan berusaha II, dan pelayanan perizinan non berusaha;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelayanan perizinan berusaha I;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelayanan perizinan berusaha II;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelayanan perizinan non berusaha; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha terdiri dari:

- a. Seksi Pelayanan Perizinan Berusaha I;

- b. Seksi Pelayanan Perizinan Berusaha II; dan
- c. Seksi Pelayanan Perizinan Non Berusaha.

(1) Seksi Pelayanan Perizinan Berusaha I mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi terkait pelayanan perizinan berusaha I.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan fasilitasi dan supervisi pelayanan perizinan berusaha I;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pelayanan perizinan berusaha I;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kegiatan pelayanan perizinan berusaha I;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pelayanan perizinan berusaha I;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait pelayanan perizinan berusaha I;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi terkait pelayanan perizinan berusaha I;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan pelayanan perizinan berusaha I; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

(1) Seksi Pelayanan Perizinan Berusaha II mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitas dan supervisi terkait pelayanan perizinan berusaha II.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan fasilitasi dan supervisi pelayanan perizinan berusaha II;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pelayanan perizinan berusaha II;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kegiatan pelayanan

- perizinan berusaha II;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pelayanan perizinan berusaha II;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait pelayanan perizinan berusaha II;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi terkait pelayanan perizinan berusaha II;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan pelayanan perizinan berusaha II; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (1) Seksi Pelayanan Perizinan Non Berusaha mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi terkait pelayanan perizinan non berusaha.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan fasilitasi dan supervisi pelayanan perizinan non berusaha;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pelayanan perizinan non berusaha;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kegiatan pelayanan perizinan non berusaha;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pelayanan perizinan non berusaha;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait pelayanan perizinan non berusaha;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi terkait pelayanan perizinan non berusaha;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan pelayanan perizinan non berusaha; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Pengaduan, Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

- (1) Bidang Pengaduan, Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengaduan dan konsultasi perizinan, data dan kearsipan perizinan serta pengelolaan sistem informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengaduan, Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengaduan dan konsultasi perizinan;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian data dan kearsipan perizinan; dan
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan sistem informasi.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun kebijakan teknis pengaduan dan konsultasi perizinan, data dan kearsipan perizinan serta pengelolaan sistem informasi;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengaduan dan konsultasi perizinan;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan data dan kearsipan perizinan;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan sistem informasi; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Pengaduan, Pengolahan Data Sistem Informasi Penanaman Modal terdiri dari:

- a. Seksi Pengaduan dan Konsultasi Perizinan;
- b. Seksi Data dan Kearsipan Perizinan; dan
- c. Seksi Pengelolaan Sistem Informasi.

- (1) Seksi Pengaduan dan Konsultasi Perizinan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pengaduan dan konsultasi perizinan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengaduan dan konsultasi perizinan;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengaduan dan konsultasi perizinan;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengaduan dan konsultasi perizinan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengaduan dan konsultasi perizinan;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait pengaduan dan konsultasi perizinan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengaduan dan konsultasi perizinan;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengaduan dan konsultasi perizinan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

- (1) Seksi Data dan Kearsipan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi data dan kearsipan perizinan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan data dan kearsipan perizinan;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data dan kearsipan perizinan;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis data dan kearsipan perizinan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi data dan kearsipan perizinan;

- e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam data dan kearsipan perizinan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (1) Seksi Pengelolaan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pengelolaan sistem informasi.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan sistem informasi;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengelolaan sistem informasi;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan sistem informasi;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengelolaan sistem informasi;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pengelolaan sistem informasi; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Perencanaan dan Penempatan Tenaga Kerja

- (1) Bidang Perencanaan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan dan pengembangan ketenagakerjaan, penempatan tenaga kerja serta perluasan kesempatan kerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian perencanaan dan pengembangan ketenagakerjaan;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penempatan tenaga kerja; dan

- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian perluasan kesempatan kerja.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut:
- a. menyusun kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan ketenagakerjaan, penempatan tenaga kerja serta perluasan kesempatan kerja;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan perencanaan dan pengembangan ketenagakerjaan;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penempatan tenaga kerja;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan perluasan kesempatan kerja; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Perencanaan dan Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari:

- a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan;
 - b. Seksi Penempatan Tenaga Kerja; dan
 - c. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja.
- (1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi perencanaan dan pengembangan ketenagakerjaan;
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan perencanaan dan pengembangan ketenagakerjaan;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kegiatan perencanaan dan pengembangan ketenagakerjaan;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kegiatan perencanaan dan pengembangan ketenagakerjaan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi perencanaan dan pengembangan ketenagakerjaan;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam kegiatan perencanaan dan

pengembangan ketenagakerjaan;

- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan perencanaan dan pengembangan ketenagakerjaan;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan perencanaan dan pengembangan ketenagakerjaan; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

(1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi penempatan tenaga kerja.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penempatan tenaga kerja;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data penempatan tenaga kerja;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penempatan tenaga kerja;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi penempatan tenaga kerja;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam penempatan tenaga kerja;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi penempatan tenaga kerja;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penempatan tenaga kerja; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

(1) Seksi Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi perluasan kesempatan kerja.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan perluasan kesempatan kerja;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data

- perluasan kesempatan kerja;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis perluasan kesempatan kerja;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi perluasan kesempatan kerja;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam perluasan kesempatan kerja;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi perluasan kesempatan kerja;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja perluasan kesempatan kerja; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Pembinaan Pelatihan Kerja, Produktivitas dan Hubungan Industrial

- (1) Bidang Pembinaan Pelatihan Kerja, Produktivitas dan Hubungan Industrial mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelatihan kerja dan kelembagaan, produktivitas tenaga kerja serta hubungan industrial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada, Bidang Pembinaan Pelatihan Kerja, Produktivitas dan Hubungan Industrial mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelatihan kerja dan kelembagaan;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian produktivitas tenaga kerja; dan
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian hubungan industrial.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut:
 - a. menyusun kebijakan teknis pelatihan kerja dan kelembagaan, produktivitas tenaga kerja serta hubungan industrial;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan

- mengendalikan pelatihan kerja dan kelembagaan;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan produktivitas tenaga kerja;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan hubungan industrial; dan
- e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Pembinaan Pelatihan Kerja, Produktivitas dan Hubungan Industrial terdiri dari:

- a. Seksi Pelatihan Kerja dan Kelembagaan;
 - b. Seksi Produktivitas Tenaga Kerja; dan
 - c. Seksi Hubungan Industrial.
- (1) Seksi Pelatihan Kerja dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pelatihan kerja dan kelembagaan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pelatihan kerja dan kelembagaan;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pelatihan kerja dan kelembagaan;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelatihan kerja dan kelembagaan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pelatihan kerja dan kelembagaan;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pelatihan kerja dan kelembagaan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelatihan kerja dan kelembagaan;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelatihan kerja dan kelembagaan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

(1) Seksi Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi produktivitas tenaga kerja.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan produktivitas tenaga kerja;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data produktivitas tenaga kerja;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis produktivitas tenaga kerja;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi produktivitas tenaga kerja;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam produktivitas tenaga kerja;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi produktivitas tenaga kerja;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja produktivitas tenaga kerja; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

(1) Seksi Hubungan Industrial mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi hubungan industrial.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan hubungan industrial;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data hubungan industrial;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis hubungan industrial;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi hubungan industrial;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam hubungan industrial;

- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi hubungan industrial;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja hubungan industrial; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Transmigrasi

- (1) Bidang Transmigrasi mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan dan pengembangan kawasan transmigrasi serta pembangunan kawasan transmigrasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada, Bidang Transmigrasi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian perencanaan dan pengembangan kawasan transmigrasi; dan
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pembangunan kawasan transmigrasi.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut:
 - a. menyusun kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan kawasan transmigrasi serta pembangunan kawasan transmigrasi;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan perencanaan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pembangunan kawasan transmigrasi; dan
 - d. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Transmigrasi terdiri dari:

- a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi; dan
- b. Seksi Pembangunan Kawasan Transmigrasi.

- (1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi perencanaan dan pengembangan kawasan transmigrasi.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan perencanaan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perencanaan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis perencanaan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi perencanaan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam perencanaan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja perencanaan dan pengembangan kawasan transmigrasi; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

- (1) Seksi Pembangunan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pembangunan kawasan transmigrasi.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembangunan kawasan transmigrasi;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pembangunan kawasan transmigrasi;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembangunan kawasan transmigrasi;

- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pembangunan kawasan transmigrasi;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pembangunan kawasan transmigrasi;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembangunan kawasan transmigrasi;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembangunan kawasan transmigrasi; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

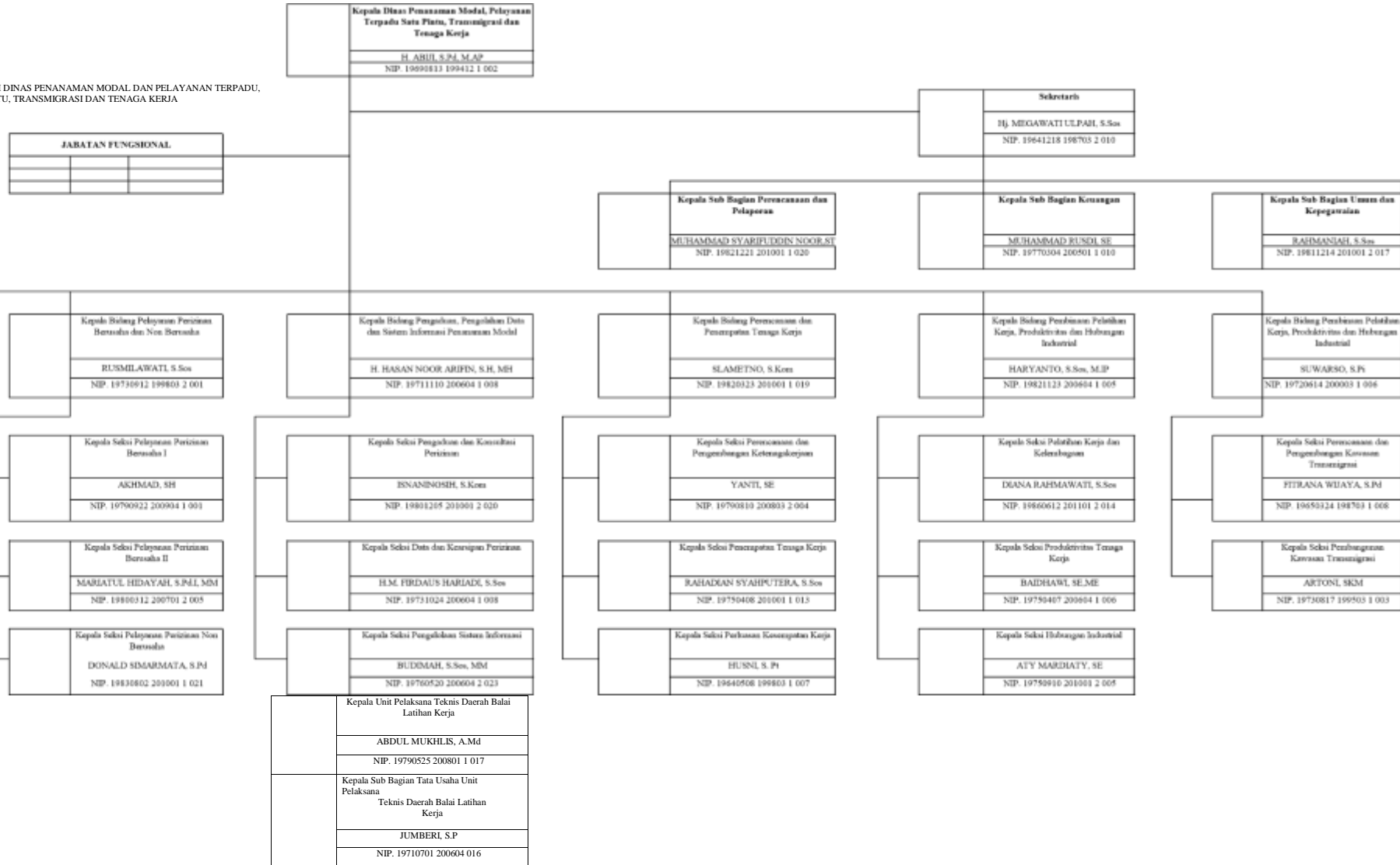
Unit Pelaksana Teknis Daerah

- (1) UPTD dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional (kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat) dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu (kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas) pada Dinas.
- (2) UPTD mempunyai fungsi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu serta pengelolaan urusan ketatausahaan pada UPTD.
- (3) UPTD dipimpin seorang Kepala UPTD yang secara administrasi, teknis dan operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) UPTD terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU, SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA



2.2 Sumber Daya Manusia SKPD

Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan (DPMPTSP) Kabupaten Balangan berjumlah 109 orang terdiri dari 48 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 61 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) dengan klasifikasi sebagai berikut :

Tabel 2.1 Pendidikan Formal

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	S2	8
2.	S1	37
3.	DIII	1
4.	SMA	2
5.	SMP	0

Tabel 2.2 Pendidikan Penjenjangan

No.	Jenjang	Jumlah
1.	PIM II	1
2.	PIM III	5
3.	PIM IV	11

Tabel 2.3 Kepangkatan

No.	Pangkat	Jumlah
1.	Golongan IV/c	1
2.	Golongan IV/b	1
3.	Golongan IV/a	6
4.	Golongan III/d	23
5.	Golongan III/c	10
6.	Golongan III/b	7
7.	Golongan III/a	4

8.	Golongan II/d	0
9.	Golongan II/c	0
TOTAL		52

Tabel 2.4. Jabatan Struktural

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Kepala Dinas Eselon II.b	S2
2.	Sekretaris Eselon III.a	S1
3.	Kepala Bidang (Kabid) Eselon III.b	S2 = 3 S1 = 3
4.	Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Kepala Seksi (Kasi) Eselon IV.a	S2 = 3 S1 = 17
5.	Kepala UPT	D3

Tabel 2.5. Staf

	Status	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	19
2.	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	61

Tabel 2.6 Data Aset DPMPTSP tahun 2020

NO	ASET	SALDO (Rp)
ASET TETAP		
1	Tanah	849.800.000,00
2	Peralatan dan Mesin	3.491.773.770,00
3	Gedung dan Bangunan	4.909.279.000,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	39.977.060,00
5	Aset Tetap Lainnya	
ASET LAINNYA		
1	Aset Lain-lain	4.991.667,00

2	Aset Tidak Berwujud	267.750.000,00
Total Aset		9.563.571.497,00

Tabel 2.7 sarana dan prasarana pendukung

No.	Nama Sarana / Prasarana	Jumlah	Kondisi
1.	Gedung Kantor	2 Buah	Baik
2.	Gedung Pelatihan/Workshop	5 Buah	Baik
3.	Aula	1 Buah	Baik
4.	Asrama	2 Buah	Baik
5.	Rumah Dinas	4 Buah	Baik
6.	Kendaraan bermotor R4	4 Buah	Baik
7.	Kendaraan bermotor R2	18 Buah	Baik
8.	Kendaraan bermotor R3	1 Buah	Baik
9.	Personal Komputer (PC)	37 Buah	Baik
10.	Laptop	42 Buah	Baik
11.	Papan Informasi	2 Buah	Baik
12.	Over Head Projector (OHP)	11 Buah	Baik
13.	Televisi	10 Buah	Baik
14.	AC	44 Buah	Baik
15.	Genset	3 Buah	Baik
16.	Printer	51 Buah	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dibentuk sebagai Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, transmigrasi dan tenaga kerja di lingkup Kabupaten Balangan. Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan juga berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Pemetaan Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Penanaman Modal, dimana membentuk susunan struktur organisasi yang berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas pokok kedinasan. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi

dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan selaku aparat Pelayanan Publik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Pelayanan Publik di bidang perizinan dan nonperizinan.

Terdapat 92 jenis pelayanan perizinan dan 4 pelayanan non perizinan yang dilayani di DPMPTSP dan . Rata-rata lama penyelesaian adalah 3 (tiga) hari kerja untuk jenis perizinan. Berikut adalah daftar perizinan yang telah dilayani pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan(DPMPTSP) Kabupaten Balangan.

Tabel 2.8 Jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

No	Izin Berusaha	Jenis Perizinan
1.	Sektor Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Toko Alat Kesehatan 2. Izin Mendirikan Rumah Sakit 3. Izin Operasional Rumah Sakit 4. Izin Mendirikan Klinik 5. Izin Operasional Klinik 6. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus 7. Izin Apotek 8. Izin Toko Obat 9. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit 10. Sertifikat Produksi Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional 11. Serifikat Produksi Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT 12. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
2.	Sektor Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Perkebunan 2. Pendaftaran Usaha Perkebunan 3. Izin Usaha Tanaman Pangan 4. Usaha Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan 5. Usaha Keterpaduan antara Proses Produksi Tanaman Pangan dan Penanganan Pascapanen 6. Usaha Perbenihan Tanaman 7. Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan

		8. Izin Usaha Hortikultura 9. Pendaftaran Usaha Hortikultura 10. Izin Usaha Peternakan 11. Pendaftaran Usaha Peternakan
3.	Sektor Perindustrian, Mikro Kecil dan Koperasi	1. Izin Usaha Industri 2. Izin Perluasan Usaha Industri 3. Izin Usaha Kawasan Industri 4. Izin Perluasan Kawasan Industri 5. Izin Koperasi Simpan Pinjam 6. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam 7. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam 8. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam 9. Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
4.	Sektor Pendidikan	1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat 2. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal
5.	Sektor Kepariwisata	1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
6.	Sektor Perdagangan	1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 2. Izin Usaha Tanpa Pemenuhan Komitmen 3. Izin Usaha Dengan Persyaratan Teknis 4. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba 5. Tanda Daftar Gudang
7.	Sektor Pekerjaan Umum	1. Izin Usaha Jasa Konstruksi 2. Tanda Daftar Usaha Perseorangan (TDUP) 3. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) 4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 5. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
8.	Sektor Lingkungan Hidup	1. Izin Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Untuk Usaha Jasa 2. Izin Penyimpanan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Untuk Penghasil

		<ul style="list-style-type: none"> 3. Izin Pembuangan Air Limbah <ul style="list-style-type: none"> a. Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan b. Pembuangan Air Limbah Secara Aplikasi ke Tanah 4. Izin Lingkungan (UKL-UPL/AMDAL) 5. Perubahan Izin Lingkungan (UKL-UPL/AMDAL) 6. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
9.	Sektor Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta 2. Izin Lembaga Pelatihan Kerja <ul style="list-style-type: none"> a. Untuk Swasta/ Masyarakat b. Untuk Pemerintah atau Perusahaan
10.	Sektor Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Usaha Perikanan (Tanda Pencatatan Usaha Budidaya Ikan) 2. Tanda Daftar Usaha Pengelolaan Hasil Perikanan
11.	Sektor Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Daerah 2. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas
12.	Sektor Perumahan dan Permukiman	Izin Lokasi
	Pelayanan Perizinan Non Berusaha (Melalui Aplikasi Si Cantik Cloud dan Perizinan Daerah)	
1.	Sektor Pekerjaan Umum	<ul style="list-style-type: none"> 1. Izin Reklame 2. Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 3. Rekomendasi Kesesuaian Lahan dan Ruang

2.	Sektor Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Operasional Puskesmas 2. Izin Unit Transfusi Darah Tingkat Kabupaten 3. Izin Pelayanan Radiologi Diagnostik 4. Izin Optikal 5. Izin Praktik Perawat 6. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut 7. Izin Praktik Perawat Anestesi 8. Surat Izin Praktik Bidan 9. Surat Izin Praktik Apoteker 10. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian/SIPTTK 11. Izin Kerja Refraksionis Optisien dan Optometris 12. Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF) 13. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM) 14. Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIK Perekam Medis) 15. Izin Praktik Okupasi Terapis 16. Surat Izin Praktik Terapis Wicara 17. Surat Izin Praktik Radiografer 18. Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis 19. Surat Izin Praktik Dokter 20. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi 21. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian 22. Surat Izin Praktik Tanaga Kesehatan Tradisional 23. Usaha Depot Air Minum (DAM) 24. Sertifikat Laik Higiene Jasa Boga.
3.	Sektor Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 2. Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 3. Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang
4.	Sektor Pertanian	<p>Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet</p> <ul style="list-style-type: none"> - Habitat Buatan - Habitat Alami
5.	Sektor Perdagangan	Surat Tanda Pendaftaran Pedagang Bahan Olah Karet Alam Spesifikasi

		Teknis (STPP-BOKAR SIR)
6.	Sektor Perumahan dan Permukiman	Rekomendasi Pengesahan Site Plan Perumahan
	Pelayanan Non Perizinan	
1	Layanan Informasi	
2	Layanan Pengaduan	
3	Layanan Konsultasi	
4	Layanan Penyusunan	
	Pelayanan Pendampingan NIB	

Dari 12 Bidang diatas terdapat perizinan yang ditarik pajak dan retribusinya yang mana dari pajak dan retribusi ini menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 2.9 Perizinan yang ditarik pajak dan retribusi

No	Jenis Izin	Target	Ket.
1.	Izin Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	5.000.000,00	
Jumlah PAD		5.000.000,00	

Untuk mengetahui kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan dimasa lalu (2016 - 2021) dapat dilihat pada Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan seperti yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2.10 (T-C. 23)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kabupaten Balangan pada Renstra 2016-2021

No	Indikator kinerja sesuai tupoksi SKPD	Target IKK	Target Renstra SOPD tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian Pada Tahun ke- (%)				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional					45 Milyar	47.25 Milyar	10.064.321.000	9.396.100.000	42.882.712.314	27.988.279.555	216.466.323.218				62,20	458,13
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perizinan				83 Nilai	86 Nilai				93,00	88,50				102,57 %	112,05 %	103%
3	Angka Pengangguran Terbuka			3,11%	2,80%	2,50%	2,55%		1,90%	2,34%	2,33%	2,46%		138,9 %	116,43 %	106,80 %	
4	Persentase angkatan kerja yang bekerja			79,10%	79,60%	80,10%	80,60%		98,10%	97,66%	97,67%	97,54%		124,02 %	122,69 %	121,94 %	
5	Angka perselisihan hubungan industrial			10 Kasus	7 Kasus	5 Kasus	4 Kasus		10 Kasus	4 Kasus	4 Kasus	9 Kasus		100%	143%	120%	
6	Angka kecelakaan kerja			5 Kasus	4 Kasus	3 Kasus	3 Kasus		6 Kasus	3 Kasus	4 Kasus	7 Kasus		80%	125%	66,67%	
7	Pendapatan warga transmigrasi per tahun			1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.800.000		1.500.000	1.600.000	1.780.500	2.000.000		100%	103,23 %	111,28 %	

Berdasarkan data pada tabel di atas Realisasi target pencapaian kinerja tahun 2020 yang di dapat berdasarkan data yang didapat pada LKPM online jumlah pelaku usaha yang sudah menyampaikan LKPM adalah sebesar Rp 216.466.323.218,00 (Dua Ratus Enam Belas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Belas Rupiah). Sedangkan untuk tahun 2019 Realisasi investasinya sebesar Rp 27.988.279.555,00 (Dua Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Lima Rupiah). Disini terjadi mengalami kenaikan sebesar atau 395,95 % dari tahun 2019.

Berdasarkan data yang didapat pada LKPM online jumlah pelaku usaha yang sudah menyampaikan LKPM tahun 2020 sebanyak 29 pelaku usaha berarti sudah 43.28% dari total 67 pelaku usaha yang terdaftar di tahun 2020. Sedangkan realisasi investasi dari 29 pelaku usaha pada tahun 2020 sebesar Rp 216.466.323.218,00 (Dua Ratus Enam Belas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Belas Rupiah). Target pencapaian kinerja ini diambil berdasarkan hasil realisasi investasi yang sudah dilaporkan oleh pelaku usaha pada aplikasi LKPM online yang sudah disetujui oleh BKPM. Penyampaian LKPM ini dilakukan secara mandiri oleh setiap pelaku usaha setiap triwulan atau 3 bulan sekali. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pencapaian realisasi investasi PMDN ini adalah sebagai berikut :

- a. PT. Surya Satria Timur yang bergerak dibidang kayu lapis telah menjual asetnya sebesar Rp. 139 milyar dan dijadikan modal tetap perusahaan. Penjualan aset ini dilakukan untuk membayar gaji karyawan sehingga menjadi realisasi investasi pada modal tetap perusahaan.
- b. Adanya perusahaan tambang yang melakukan pembebasan lahan untuk melakukan penambangan. Hal ini membuat realisasi penanaman modal pada modal tetap perusahaan menjadi lebih besar.
- c. Beberapa perusahaan yang pada tahun 2019 melakukan ijin perluasan usahanya telah melaksanakan pekerjaannya
- d. Jumlah perusahaan yang mendaftarkan NIB nya pada periode pelaporan

triwulan IV yaitu pada bulan Oktober, Nopember dan Desember 2019 seperti CV. An Nur, CV Ulin Berseri dan, CV. Annisa Permai yang mendaftar pada bulan Desember 2019, perusahaan ini melaporkan LKPM nya pada triwulan I tahun 2020.

- e. Strategi “Jemput Bola” (datang secara langsung ke tempat pelaku usaha) yang dilaksanakan oleh DPMPTSP dalam upayanya meningkatkan realisasi penanaman modal mempunyai dampak yang signifikan. Banyak pelaku usaha yang memberikan data realisasi penanaman modalnya untuk dilaporkan dalam aplikasi LKPM Online. Hal ini dilakukan pelaku usaha karena banyak diantara pelaku usaha yang belum memahami bagaimana caranya mengoperasikan aplikasi LKPM Online tersebut.

Disamping itu, faktor lain yang mempengaruhi capaian investasi juga berasal dari internal organisasi. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh DPMPTSP pada tahun 2019 yang menghambat pencapaian target realisasi investasi dapat diselesaikan dan diperbaiki pada tahun 2020, kendala – kendala yang dihadapi dapat diselesaikan dan dicarikan solusinya.

Realisasi target pencapaian kinerja tahun 2020 yang didapat dari Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebesar 88,50% (A). Sedangkan untuk tahun 2019 Realisasi nilai IKM sebesar 93 % (A). Disini terjadi penurunan nilai IKM sebesar 4,5 %. Penurunan nilai IKM ini melebihi dari target Renstra DPMPTSP tahun 2016-2021 sebesar 86 %.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Secara keseluruhan nilai IKM ini terlihat dari unsur pelayanan sangat baik tapi masih perlu ditingkatkan dari segi pelayanan, kemampuan dari front liner Ruang pelayanan telah sesuai dengan standar kenyamanan dan fasilitas ruang pelayanan, telah terdapat ruang laktasi, ruang bermain anak, ruang tunggu yang dilengkapi dengan pendingin ruangan yang baik, ruang membaca, dan plakat-plakat informasi mengenai pelayanan, serta telah dilengkapi dengan fasilitas disabilitas seperti ram dan handling.

Permasalahan/Hambatan

Masih kurangnya pemahaman masyarakat dalam pengisian kuesioner indeks kepuasan masyarakat, dan sebagian ada yang tidak mengisi kuesioner yang telah disediakan oleh petugas pelayanan.

Solusi/Strategi Pemecahan masalah

1. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan secara periodik baik secara internal maupun eksternal, untuk memantau kondisi pelayanan dan persepsi masyarakat terhadap perbaikan yang telah dilakukan.
2. Kinerja personil petugas pelayanan dipertahankan dengan melakukan Bimtek Excelent service dalam hal pelayanan personil sehingga dapat meningkatkan tanggung jawab petugas pelayanan.

Tabel 2.11 (T-C. 24)

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Realisasi investasi	244,340,000	102,880,000	123,893,000	27,680,000	24,375,000	241,825,000	102,880,000	122,548,749	27,680,000	23,990,000	98.97%	100.00%	98.91%	100.00%	98.42%	114%	115%
Angka pengangguran terbuka	-	4,848,874,550	1,862,462,000	3,598,862,165	9,112,139,150	-	4,661,127,237	1,852,521,906	3,552,450,192	9,030,180,102		96.13	99.47	98.71	99.10	301%	310%
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMPTSPPTK	51,100,000	37,100,000	30,365,000	40,950,000	40,300,000	51,100,000	36,910,000	29,800,000	40,800,000	40,000,000	100.00%	99.49%	98.14%	99.63%	99.26%	291%	289%

Tabel 2.12 (Formulir E.55)

Evaluasi Hasil terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
 Renja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan
 Periode Pelaksanaan Tahun 2020

No	Saaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah sid tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah sid tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5		6		7		8	9	10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%						
1	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	6.126.387.100,00	100%	4.501.162.186,00	100%	946.605.700,00	46,40%	199.667.112,00	33,49%	182.862.536,00	5,26%	120.930.222,00	12,85%	435.126.807,00	100,00%	938.586.677,00	100%	5.439.748,863	100,00%	88,79%	DPMPTSP
		Kegiatan Penyediaan Jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa surat menyurat dan kelengkapannya (lembar)	610	28.600.000,00	1.300	19.750.000,00	2.250	10.050.000,00	1.250	5.550.000,00	0	0,00	0	0,00	1000	4.500.000,00	2.250	10.050.000,00	3.600	29.800,000	590,16%	104,20%	DPMPTSP
		Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)	72	529.650.000,00	48	311.303.218,00	12	99.400.000,00	3	29.646.025,00	3	23.228.036,00	3	14.099.778,00	3	24.909.738,00	12	91.883.577,00	60	403.186,795	83,33%	76,12%	DPMPTSP
		Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan (bulan)	72	1.473.988.000,00	48	654.300.000,00	12	278.014.000,00	3	56.700.000,00	3	56.700.000,00	3	18.900.000,00	3	145.238.800,00	12	277.538.800,00	60	931.838,800	83,33%	63,22%	DPMPTSP
		Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor (bulan)	72	230.602.000,00	48	152.102.000,00	12	15.934.300,00	3	0,00	3	7.248.900,00	3	0,00	3	8.685.400,00	12	15.934.300,00	60	168.036,300	83,33%	72,87%	DPMPTSP
		Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor (Bulan)	1.492	350.579.500,00	2.319	285.566.400,00	632	34.797.200,00	200	10.723.400,00	100	9.936.100,00	0	0,00	332	14.110.300,00	632	34.769.800,00	2.951	320.336,200	197,79%	91,37%	DPMPTSP
		Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan (lembar)	31.992	436.732.600,00	97.902	284.073.600,00	67.451	44.221.500,00	32.760	9.828.000,00	23.568	18.619.300,00	3.672	5.808.800,00	7.451	9.965.400,00	67.451	44.221.500,00	165.353	328.295,100	531,82%	75,17%	DPMPTSP
		Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Bulan)	96	128.905.000,00	105	82.707.000,00	46	15.628.700,00	30	4.691.300,00	5	2.925.900,00	0	0,00	11	8.011.500,00	46	15.628.700,00	151	98.335,700	158,95%	76,29%	DPMPTSP
		Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (bulan)	72	53.210.000,00	48	33.260.000,00	12	4.000.000,00	3	0,00	3	2.050.000,00	3	0,00	3	1.950.000,00	12	4.000.000,00	60	37.260,000	83,33%	70,02%	DPMPTSP
		Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman (bulan)	72	141.860.000,00	48	85.180.000,00	12	18.560.000,00	3	1.975.000,00	3	6.025.000,00	3	0,00	3	10.560.000,00	12	18.560.000,00	60	103.740,000	83,33%	73,13%	DPMPTSP
		Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (kegiatan)	145	2.107.400.000,00	189	2.155.399.968,00	75	300.000.000,00	15	74.593.387,00	10	45.069.300,00	30	78.361.644,00	20	101.975.669,00	75	300.000.000,00	264	2.455.399,968	182,07%	116,51%	DPMPTSP
		Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah (kegiatan)	204	644.860.000,00	339	437.520.000,00	315	126.000.000,00	15	5.960.000,00	27	11.960.000,00	9	3.760.000,00	264	105.220.000,00	315	126.000.000,00	654	563.520,000	320,99%	87,39%	DPMPTSP
Rata-rata capaian kinerja (%)																15752,091	494522623,9		218,00%	82,39%				
Predikat kinerja																SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	TINGGI					

2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Baik	100%	2,748,473,000.00	100%	1,672,912,860.00	100%	359,704,000.00	20.00%	37,675,200	35.56%	94,171,800.00	15.56%	16,015,000.00	28.89%	205,766,000.00	100.00%	353,628,000.00	100%	2,026,540,860	100.00%	73.73%	DPMPTSP
	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas (buah)	7	656,000,000.00	4	101,250,000.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	4	101,250,000	57.14%	15.43%	DPMPTSP
	Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	49	97,650,000.00	49	97,650,000.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	49	97,650,000	100.00%	100.00%	DPMPTSP
	Kegiatan Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur (buah)	23	180,280,000.00	37	106,480,000.00	5	33,904,000.00	0	0.00	4	1,600,000.00	0	0.00	1	32,300,000.00	5	33,900,000.00	42	140,380,000	182.61%	77.87%	DPMPTSP
	Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor	Tersedianya Peralatan Kantor (buah)	13	62,150,000.00	10	97,510,000.00	6	36,250,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	36,200,000.00	6	36,200,000.00	16	133,710,000	123.08%	215.14%	DPMPTSP
	Kegiatan Pengadaan Komputer	Tersedianya Komputer (buah)	19	285,400,000.00	15	231,150,000.00	10	95,900,000.00	0	0.00	3	41,478,000.00	1	4,500,000.00	6	49,922,000.00	10	95,900,000.00	25	327,050,000	131.58%	114.59%	DPMPTSP
	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor (bulan)	48	93,660,000.00	24	355,937,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	24	355,937,000	50.00%	380.03%	DPMPTSP
	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (bulan)	72	970,033,000.00	48	460,385,860.00	12	126,650,000.00	3	32,675,200	3	29,518,800.00	3	11,515,000.00	3	52,119,000.00	12	125,828,000.00	60	586,213,860	83.33%	60.43%	DPMPTSP
	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	72	403,300,000.00	48	222,550,000.00	12	67,000,000.00	3	5,000,000	3	21,575,000.00	3	0.00	3	35,225,000.00	12	61,800,000.00	60	284,350,000	83.33%	70.51%	DPMPTSP
Rata-rata capaian kinerja (%)																		490.00%	29434077200.00%	191.38%	129.25%		
Predikat kinerja																		SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI		
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur	100%	389,600,000.00	100%	267,000,000.00	100%	42,500,000.00	50.00%	20,000,000	0	0	0	0	50.00%	22,500,000.00	100.00%	42,500,000.00	100%	309,500,000	100.00%	79.44%	DPMPTSP
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya (stet)	230	186,700,000.00	140	140,500,000.00	45	22,500,000.00	0	0	0	0	0	0	45	22,500,000.00	45	22,500,000.00	185	163,000,000	80.43%	87.31%	DPMPTSP
	Pengadaan Pakaian KORPRI	Tersedianya pakaian KORPRI (stet)	63	28,000,000.00	38	19,000,000.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0.00	38	19,000,000	60.32%	67.86%	DPMPTSP
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu (stet)	190	91,700,000.00	85	50,500,000.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0.00	85	50,500,000	44.74%	55.07%	DPMPTSP
	Pengadaan pakaian kedaerahan	Tersedianya pakaian kedaerahan (stet)	170	83,200,000.00	114	57,000,000.00	40	20,000,000.00	40	20,000,000	0	0	0	0	0	-	40	20,000,000.00	154	77,000,000	90.59%	92.55%	DPMPTSP
Rata-rata capaian kinerja (%)																		115.5	77375000	69.02%	75.70%		
Predikat kinerja																		SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SEDANG	SEDANG		

4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	1.236.535.000,00	100%	617.784.730,00	100%	145.000.000,00	25.00%	30.000.000,00	33.33%	42.250.000,00	0,00%	-	41.67%	72.400.000,00	100%	144.650.000,00	100%	762.434.730	100,00%	61.66%	DPMPTSP	
	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi yang Dilaksanakan (kegiatan)	16	201.685.000,00	16	201.685.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	16	201.685.000	100,00%	100,00%	DPMPTSP	
	Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan(OK)	72	1.034.850.000,00	74	416.099.730,00	24	145.000.000,00	6	30.000.000,00	8	42.250.000,00	0	0	10	72.400.000,00	24	144.650.000,00	98	560.749.730	136,11%	54,19%	DPMPTSP	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			98	560749730	118,96%	77,09%		
Predikat kinerja																			SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	TINGGI		
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Predikat Akutabilitas dan Kinerja SKPD	100%	258.730.000,00	100%	234.410.637,00	100%	28.173.000,00	44,44%	3.290.400,00	22,22%	11.949.600,00	0,00%	0,00	33,33%	12.933.000,00	100,00%	28.173.000,00	100%	262.583,637	100,00%	101,49%	DPMPTSP	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Renja, Renja Perubahan, LAKIP, LPPD, Laporan Keuangan (dokumen)	21	194.200.000,00	11	195.930.637,00	5	14.001.000,00	3	1.495.900,00	1	4.984.100,00	0	0,00	1	7.521.000,00	5	14.001.000,00	16	209.931,637	76,19%	108,10%	DPMPTSP	
	Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Tersusunnya RKA dan DPA DPMPTSP (dokumen)	22	64.530.000,00	14	38.480.000,00	4	14.172.000,00	1	1.794.500,00	1	6.965.500,00	0	0,00	2	5.412.000,00	4	14.172.000,00	18	52.652,000	81,82%	81,59%	DPMPTSP	
Rata-rata capaian kinerja (%)																					79,00%	94,85%		
Predikat kinerja																			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	TINGGI	SANGAT TINGGI		
6	Meningkatnya Investasi Daerah	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Kerjasama Pemberdayaan Dunia Usaha yang ditindaklanjuti	100%	1.651.888.500,00	100%	430.177.154,00	100%	1.493.072.000,00	0%	-	0%	29.737.000,00	80%	143.840.700,00	20%	1.295.517.300,00	100%	1.469.095.000,00	100%	1.899.272.154	100,00%	114,98%	DPMPTSP
	Peningkatan Kerjasama Strategis antar Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah	Terciptanya Kerjasama Strategis Antar Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah (MoU)	4	129.020.000,00	2	55.294.898,00	1	31.388.000,00	0	0,00	0	2.777.000,00	2	1.158.000,00	3	27.453.000,00	7	31.388.000,00	#REF!	86,672,898	#REF!	67,18%	DPMPTSP	
	Pengembangan potensi unggulan daerah	Terlaksananya Ekspose tentang Potensi Unggulan Daerah (kegiatan)	12	297.150.000,00	2	27.540.000,00	2	1.352.924.000,00	0	0,00	0	0	1	142.682.700,00	1	1.186.734.300,00	2	1.329.417.000,00	4	1.356.957.000	33,33%	456,66%	DPMPTSP	
	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Tersusunnya RUPM dan Perbup Tata Cara Pemberian Insentif Kemudahan Berinvestasi di Daerah (dokumen)	4	534.949.500,00	2	148.849.200,00	1	55.300.000,00	0	0,00	0	0	0	0	1	54.830.000,00	1	54.830.000,00	#REF!	203.679,200	#REF!	38,07%	DPMPTSP	
	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Pelaksanaan Pameran Investasi (kegiatan)	9	690.769.000,00	3	198.503.056,00	1	53.460.000,00	0	0,00	0	26.960.000,00	0	0	1	26.500.000,00	0	53.460.000,00	#REF!	251.963,056	#REF!	36,48%	DPMPTSP	
Rata-rata capaian kinerja (%)																					#REF!	149,60%		
Predikat kinerja																			#REF!	#REF!	SANGAT TINGGI			

7	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase Perusahaan yang menyampaikan LKPM (%)	100%	2.705.590.000,00	100%	883.310.875,00	100%	95.371.400,00	0%	0	84,62%	27.061.000,00	5,00%	0	10,38%	67175400	100,00%	94.236.400,00	100%	977.547.275	100,00%	38,13%	DPMPPTSP
	Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur	Tersedianya Draft NSPK (dokumen)	0	-	0	-	0	0,00	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00%	0,00%	DPMPPTSP
	Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi	Terlaksananya Sosialisasi tentang Insentif dan Kemudahan Berinvestasi (kegiatan)	1	24.450.000,00	1	24.450.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1	24.450.000	100,00%	100,00%	DPMPPTSP
	Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	Jumlah Data dan Informasi Penanaman Modal (dokumen)	4	635.240.000,00	2	202.789.458,00	1	59.050.000,00	0	0	0	0	0	0	1	58.300.000,00	1	58.300.000,00	3	261.089.458	75,00%	41,10%	DPMPPTSP
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi Realisasi Investasi (dokumen)	4	162.135.000,00	2	45.895.000,00	1	11.946.400,00	0	0	0	10.371.000,00	0	0	1	1.575.400,00	1	11.946.400,00	3	57.841.400	75,00%	35,67%	DPMPPTSP
	Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Perizinan	Jumlah Laporan Tim (kegiatan)	3	347.220.000,00	4	347.220.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	4	347.220.000	133,33%	100,00%	DPMPPTSP
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang menyampaikan LKPM (Perusahaan)	40	1.067.585.000,00	31	150.228.749,00	11	24.375.000,00	0	0	11	16.690.000,00	6	0	6	7.300.000,00	23	23.990.000,00	54	174.218.749	135,00%	16,32%	DPMPPTSP
	Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pelaku Usaha di Bidang Investasi	Jumlah Pelaku Usaha (sasaran) yang menerima sosialisasi (Pelaku Usaha)	400	468.960.000,00	303	112.727.668,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	303	112.727.668	75,75%	24,04%	DPMPPTSP
Rata-rata capaian kinerja (%)																		90,75	151.469319,8	99,01%	52,66%		
Predikat kinerja																		SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	RENDAH		
8	Program Penyajian Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	Jumlah sektor potensi sumber daya investasi (sektor)	100%	509.872.500,00	100%	285.708.700,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	285.708.700	100%	56,04%	DPMPPTSP
	Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan investasi	Dokumen Kajian Investasi Kabupaten Balangan (dokumen)	1	270.900.000,00	1	270.900.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	270.900.000	100%	100,00%	DPMPPTSP
	Penyusunan Profil Potensi Sumber Daya Investasi	Tersedianya Dokumen Profil Investasi Kabupaten Balangan (dokumen)	4	238.972.500,00	0	14.808.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.808.700	0%	6,20%	DPMPPTSP
Rata-rata capaian kinerja (%)																		0,0	142854330	0,00%	53,10%		
Predikat kinerja																		SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH	RENDAH		
9	PENATAAN DAN PENGEMBANGAN DATA PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL	Tersedianya Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	100%	683.300.000,00	100%	290.688.803,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#REF!	290.688.803	#REF!	43%	DPMPPTSP
	Pengembangan Aplikasi dan Sistem Informasi Pengelolaan Perizinan Secara Online	Aplikasi dan Sistem Informasi Pengelolaan Perizinan Secara Online (paket)	2	558.250.000,00	2	65.111.071,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#REF!	65.111.071	#REF!	12%	DPMPPTSP
	Penelitian dan Pengembangan Sistem Informasi Teknologi	Pemeliharaan Aplikasi Perizinan dan Pengembangan Informasi Teknologi (IT) (aplikasi)	1	17.500.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#REF!	-	#REF!	0%	DPMPPTSP
	Publikasi Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	Tersedianya Bahan Publikasi Informasi Perizinan dan Penanaman Modal (paket)	1	107.550.000,00	1	225.577.732,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#REF!	225.577.732	#REF!	210%	DPMPPTSP
Rata-rata capaian kinerja (%)																		#REF!	96896267,67	#REF!	73,80%		
Predikat kinerja																		#REF!	SANGAT TINGGI	#REF!	SEDANG		

10	PROGRAM PENATAAN NSPK BIDANG PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL	Sinkronisasi dan Harmonisasi NSPK	100%	340.725.000.00	100%	379.345.649.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	379.345.649	100%	111.33%	DPMPTSP
	Kajian NSPK Bidang Perizinan dan Penanaman Modal	Naskah Akademik NSPK (NSPK)	1	206.600.000.00	1	206.049.649.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	206.049.649	100%	99.73%	DPMPTSP
	Desimiliasi dan Sosialisasi NSPK Bidang Perizinan dan Penanaman Modal	Tertaksananya Sosialisasi Produk NSPK Bidang Perizinan dan Penanaman Modal (kegiatan)	8	106.625.000.00	8	141.796.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	141.796.000	100%	132.99%	DPMPTSP	
	Kodefikasi dan Dokumentasi NSPK Bidang Perizinan dan Penanaman Modal	Jumlah NSPK yang Didokumentasikan (NSPK)	6	27.500.000.00	6	31.500.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	31.500.000	100%	114.55%	DPMPTSP	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			5	126485487	100.00%	115.79%		
Predikat kinerja																			SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI		
11	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	110.045.000.00	100%	81.986.500.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	81.986.500	100%	74.50%	DPMPTSP	
	Penyusunan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Survey dan Tersusunnya Dokumen IKM (dokumen)	1	30.365.000.00	1	29.800.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	29.800.000	100%	98.14%	DPMPTSP	
	Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan	Pengaduan Masyarakat yang Ditangani dan Terealisasi (%)	100	79.680.000.00	100	52.186.500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	52.186.500	100%	65.50%	DPMPTSP	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			59.5	40993250	100.00%	81.82%		
Predikat kinerja																			SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	TINGGI		
12	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	PENINGKATAN KUALITAS DAN KEMUDAHAN PERIZINAN	Persentase Pemenuhan Pemohonan Perizinan dan Non Perizinan	100%	1.768.485.200.00	100%	381.064.433.00	100%	62.431.000.00	51.13%	19.108.000	32.29%	7.740.000	8.00%	0	8.62%	30.980.900.00	100%	57.828.900.00	100%	438.893.333	100.00%	24.82%	DPMPTSP
	Penyediaan Jasa Teknis Perizinan	Jumlah Izin Yang diterbitkan (Buah)	2200	370.669.000.00	1.087	61.930.000.00	600	37.800.900.00	366	15.000.000	222	7.740.000	223	0	301	15.060.900.00	1112	37.800.900.00	2.199	99.730.900	99.95%	26.91%	DPMPTSP	
	Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Perizinan	Persentase Pemenuhan Pemohonan Perizinan dan Non Perizinan	100	711.597.300.00	100	233.558.100.00	100	18.070.100.00	25	4.108.000	25	0	25	0	25	10.960.000.00	100	15.068.000.00	100	248.626.100	100.00%	34.94%	DPMPTSP	
	Pembinaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Bidang Perizinan (Kegiatan)	5	311.674.450.00	1	84.976.333.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	1	84.976.333	20.00%	27.25%	DPMPTSP	
	Peninjauan Lapangan untuk Syarat Teknis Pemberian Izin Usaha	Jumlah Izin Yang diterbitkan (Buah)	100	184.234.600.00	100	600.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	100	600.000	100.00%	0.33%	DPMPTSP	
	Peninjauan Lapangan untuk Syarat Teknis Pemberian Izin Tertentu	Persentase Pemenuhan Pemohonan Perizinan Jasa Usaha	100	190.109.850.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00%	0.00%	DPMPTSP	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan perizinan	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang harus dievaluasi (Buah)	100	193.105.400.00	50	4.700.000.00	100	6.560.000.00	13	0.00	11	0.00	44	0.00	45	4.960.000.00	113	4.960.000.00	163	9.660.000	163.00%	5.00%	DPMPTSP	
Rata-rata capaian kinerja (%)																					80.49%	15.74%		
Predikat kinerja																					TINGGI	SANGAT RENDAH		

13	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	3,641,000,000.00	100%	296,030,000.00	100%	157,588,100.00	0%	0	5.56%	9,218,000.00	77.78%	0.00	17.00%	137,483,900.00	100%	146,701,900.00	100%	304,291,000	100.00%	8.36%	DPMPTSP
	Penyusunan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat (Dokumen)	3	340,599,000.00	1	40,800,000.00	1	40,300,000.00	0	0.00	0	0	0	0.00	1	40,000,000.00	1	40,000,000.00	2	80,300,000	66.67%	23.58%	DPMPTSP
	Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan	Jumlah Unit Penanganan Pengaduan (Unit)	3	466,048,000.00	1	28,800,000.00	1	5,400,000.00	0	0.00	0	0	0	0.00	1	5,400,000.00	0	5,400,000.00	1	10,800,000	33.33%	2.32%	DPMPTSP
	Pengembangan Aplikasi dan Sistem Informasi Pengelolaan Perizinan Secara Online	Jumlah Perizinan yang Akan Diproses Secara Online (paket)	6	508,382,900.00	2	82,490,000.00	0	-	0	0.00	0	0	0	0.00	-	0	0.00	2	0	33.33%	0.00%	DPMPTSP	
	Publikasi Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	Jumlah Publikasi Informasi Perizinan dan Penanaman Modal (informasi)	13	1,035,235,600.00	1	64,875,000.00	1	27,357,700.00	0	0.00	0	9,218,000.00	0	0.00	4	16,362,500.00	4	25,580,500.00	5	52,938,200	38.46%	5.11%	DPMPTSP
	Kajian NSPK Bidang Perizinan dan Penanaman Modal	Jumlah Naskah Akademik NSPK (NSPK)	3	711,815,500.00	0	0	1	48,000,000.00	0	0.00	0	0	0	0.00	1	39,190,000.00	1	39,190,000.00	1	87,190,000	33.33%	12.25%	DPMPTSP
	Desimilasi dan Sosialisasi NSPK Bidang Perizinan dan Penanaman Modal	Jumlah Sosialisasi Produk NSPK Bidang Perizinan dan Penanaman Modal (Kegiatan)	24	420,701,000.00	8	51,065,000.00	2	16,531,600.00	0	0.00	0	0	0	0.00	2	16,531,600.00	2	16,531,600.00	10	33,063,200	41.67%	7.86%	DPMPTSP
	Kodefikasi dan Dokumentasi NSPK Bidang Perizinan dan Penanaman Modal	Jumlah NSPK yang didokumentasikan (NSPK)	18	158,218,000.00	6	28,000,000.00	6	19,999,800.00	0	0.00	0	0	0	0.00	24	19,999,800.00	24	19,999,800.00	30	39,999,600	166.67%	25.28%	DPMPTSP
Rata-rata capaian kinerja (%)																			7.2857143	43470142.86	59.07%	10.91%	
Predikat kinerja																			SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	RENDAH	SANGAT RENDAH	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM				3,330,446,200.00	2	309,740,712.00	2	404,989,936.00	2	280,785,922.00	2	2,279,883,307	9	3,275,399,877									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 14)																					100.00%	65.49%	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 14)																					SANGAT TINGGI	RENDAH	
<p>Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Dengan Meningkatkan pelayanan perizinan untuk menarik minat investor</p> <p>Faktor penghambat pencapaian kinerja: Masih ada beberapa jenis perizinan yang belum dilayani di PTSP</p> <p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:</p> <p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya:</p>																							

Dalam Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN tahun 2010 -2014, pengarusutamaan gender (PUG) menjadi salah satu strategi pembangunan selain pembangunan berkelanjutan dan tata-kelola pemerintahan yang baik. Hal ini ditempuh untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan PUG yang diamanatkan dalam Inpres No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang belum berjalan seperti yang diharapkan. Dengan Inpres ini diinstruksikan kepada seluruh jajaran pemerintahan baik di pusat maupun daerah agar mengintegrasikan kondisi, aspirasi dan kebutuhan laki - laki dan perempuan dalam setiap tahapan manajemen instansinya. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan infrastruktur perhubungan yang responsif gender, Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan telah melakukan Penyusunan Data Terpilah Bidang Perhubungan Yang Responsif Gender.

Anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan PUG adalah mata anggaran yang secara eksplisit menyebutkan kebutuhan perempuan dan laki- laki, yang ditunjukkan dengan program kegiatan yang dilaksanakan. Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan juga telah Menyusun focal point PUG. Keberadaan Focal Point PUG sebagai implementasi dari Permendagri No. 67 tahun 2011 merupakan komponen penting sebagai pionir dalam upaya mengedepankan pengarusutamaan gender (PUG) pada program dan perencanaan pembangunan di Dinas Perhubungan. Teknis penyusunan PPRG Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan dilakukan melalui (1) analisis gender dengan Gender Analysis Pathway (GAP), (2) penyusunan Gender Budget Statement/Pernyataan Anggaran Gender (GBS/PAG) dan (3) mengintegrasikan hasil GAP, GBS dalam penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dalam analisa strategi yang mempengaruhi adalah analisa lingkungan internal dan analisa lingkungan eksternal. Analisa lingkungan internal adalah analisis terhadap kondisi internal organisasi melalui identifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki organisasi dalam rangka mencapai tujuan.

Yang menjadi faktor kekuatan yang akan mendorong terhadap kondisi yang direncanakan di antaranya :

1. Kebijakan – kebijakan yang menaungi dari pusat (UU no 25 tahun 2007 dan Perka BKPM No.9 th.2012);
2. Permendagri No.20 Th.2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan terpadu Satu Pintu dan Perda No.3 th.2008 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (DPMPTSP) Kab.Balangan;
3. Penduduk balangan yang masih sedikit sehingga memungkinkan pelayanan perizinan yang cepat;
4. Banyaknya serikat pekerja buruh;
5. LKS Bipartit;
6. Dewan Pengupahan;
7. Tersedianya peraturan Perundang –undangan tentang Ketenagakerjaan;
8. Tersedianya pegawai;
9. Adanya organisasi pelaksana;
10. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang cukup memadai;
11. Adanya Anggaran atau Dana.

Sedangkan yang menjadi faktor kelemahan yang akan menghambat terhadap kondisi yang direncanakan diantaranya :

1. Masih ada peraturan daerah tentang perizinan yang belum pas sehingga dalam pelaksanaannya masih sulit diterapkan;
2. Masih kurangnya koordinasi dengan dinas terkait;
3. Masih kurangnya promosi – promosi dalam bentuk pameran investasi;
4. Masih ada beberapa jenis perizinan yang belum dilayani di PTSP;

5. Masih kurangnya komunikasi antar Pusat dan Daerah Khususnya mengenai peraturan perundang – undangan yang berlaku;
6. Tidak memiliki Tenaga Fungsional Instruktur;
7. Kurang tersedianya infrastruktur yang mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, fasilitas informasi pasar kerja;
8. Kualitas Angkatan kerja masih rendah (Pendidikan, Keterampilan dan Kemandirian);
9. Belum memadainya jumlah pegawai pengawas Ketenagakerjaan bila dibandingkan dengan objek pengawasan yang cenderung meningkat;
10. Masih adanya kekosongan hukum pada beberapa aspek pengaturan Ketenagakerjaan;
11. Kebijakan makro yang belum diarahkan secara langsung kepada penciptaan kerja sebanyak – banyaknya, seperti kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.

Memperhatikan perencanaan sebagai fungsi manajerial untuk memelihara keberlangsungan dan perbaikan kinerja lembaga, Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan tahun 2021-2026 disusun sebagai kelanjutan dari Renstra sebelumnya tahun 2016-2021. Pencapaian hasil bidang Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, pembinaan SDM, peningkatan sarana dan prasarana, pendanaan, penyempurnaan manajemen dalam kurun waktu 2016-2021 menjadi modal bagi perencanaan kegiatan bidang Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja tahun 2021-2026.

Dalam kurun waktu 2016-2021 terdapat berbagai permasalahan di bidang Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang harus diantisipasi dan diselesaikan di periode 2021-2026. Adapun Tantangan dan Peluang Pengembangan bidang Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja di Kabupaten Balangan dapat dijabarkan sebagai berikut :

2.4.1. Tantangan yang dihadapi

1. Pola pikir masyarakat tentang pelayanan publik yaitu tentang pungutan dan birokrasi yang buruk

2. Minat investor asing yang belum begitu besar
3. Beberapa kebijakan perizinan penanaman modal yang belum mengakomodir kebutuhan pemodal
4. Masih banyak belum dibuatnya aturan daerah sebagai turunan dari aturan pusat dalam menyikapi kebijakan perizinan di daerah.
5. Kualitas pendidikan, keterampilan dan motivasi kerja para transmigran masih rendah;
6. Kesejahteraan transmigran di unit permukiman transmigrasi binaan masih rendah;
7. Jumlah penganggur terbuka dan setengah penganggur masih cukup besar dan rata-rata belum memiliki keterampilan dan pengalaman kerja.
8. Rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja masih rendah;
9. Lowongan kerja semakin terbatas;
10. Pemahaman dan kepatuhan pengusaha akan peraturan perundang-undangan masih rendah;
11. Pemahaman pekerja dan pengusaha akan hak dan kewajiban masih rendah;
12. Tingginya angkatan kerja yang mencari pekerjaan;
13. Tingkat keterampilan tenaga kerja masih rendah;
14. Wirausaha baru kurang berkembang;
15. Sulitnya membangun dan mengembangkan wilayah transmigrasi;
16. Sulitnya pengurusan terhadap sertifikat kepemilikan lahan transmigrasi;
17. Kurangnya data dan informasi tentang Ketransmigrasian dan Ketenagakerjaan.

2.4.2. Peluang

1. Adanya masyarakat ekonomi asean yang mulai berlaku pada tahun 2016;
2. Adanya kewajiban daerah- daerah untuk segera mungkin menyusun RUPM berdasarkan UU 25 Tahun 2007;

3. Undang – undang no 20 tahun 2014 tentang otonomi daerah yang memberikan keleluasaan untuk mengembangkan daerah masing – masing;
4. Dukungan Pemerintah Kabupaten terhadap program Ketrasmigrasian dan Ketenagakerjaan cukup tinggi;
5. Masih terbukanya kesempatan kerja, baik di dalam daerah maupun di luar daerah dan juga di Luar Negeri;
6. Masih terbukanya peluang kesempatan berwirausaha;
7. Masih tersedianya lahan kosong yang belum dimanfaatkan secara optimal;
8. Keinginan masyarakat ingin maju semakin meningkat.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai diperlukan suatu usaha dan strategi yang tepat agar tantangan yang ada dapat teratasi sehingga dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik dari periode sebelumnya.

2.5 Faktor Kunci Keberhasilan

Dari Analisis diatas dapat dijelaskan beberapa faktor kunci keberhasilan sebagai berikut :

1. Dengan Meningkatkan pelayanan perizinan untuk menarik minat investor
2. Menerapkan SOP untuk menciptakan pelayanan yang berkualitas
3. Meningkatkan kualitas SDM dan pendanaan untuk membuat citra pelayanan yang bersih dan profesional
4. meningkatkan disiplin aparatur dan membentuk struktur organisasi yang jelas untuk melaksanakan pelayanan perizinan terpadu
5. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait
6. Mengoptimalkan implementasi regulasi – regulasi perizinan dan penanaman modal serta mengidentifikasi dan mengajukan perbaikan regulasi terkait bagi yang belum dapat diterapkan dimasyarakat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SKPD

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.1.1. Permasalahan Investasi Daerah Kabupaten Balangan

Permasalahan dibidang perekonomian lainnya adalah tingkat investasi (PMA dan PMDN) di Kabupaten Balangan. Berdasarkan data dari Bab dua sebelumnya diketahui bahwa pertumbuhan investasi di Kabupaten Balangan selama lima tahun terakhir sangat berfluktuasi. Tahun 2018 merupakan tahun dimana tingkat pertumbuhan investasi di Kabupaten Balangan cukup tinggi, namun mengalami penurunan sebesar -36,56 ditahun 2019. Investasi yang berkualitas seharusnya memberikan dampak bagi kesejahteraan penduduk dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Balangan. Investor sebaiknya diarahkan untuk berinvestasi pada sektor dengan keterkaitan ke depan dan ke belakang yang tinggi yang akan menciptakan multiplier yang besar bagi perekonomian. Hingga saat ini aktivitas investasi di kabupaten Balangan tercatat mengarah ke dua sektor utama yakni Sektor Pertambangan (untuk PMA) dan Jasa Lainnya (untuk PMDN).

Sebagaimana diuraikan di atas kedua sektor ini hingga saat ini hampir tidak memiliki keterkaitan ke depan maupun ke belakang (multipliernya rendah). Selain permasalahan kualitas investasi, permasalahan lainnya yang ada di bidang investasi adalah permasalahan kepastian hukum dan kemudahan perijinan. Berdasarkan hasil FGD diketahui bahwa belum ada Peraturan Daerah yang membahas mengenai investasi di Kabupaten Balangan yang menyebabkan investor masih ragu jika berinvestasi di Kabupaten Balangan karena tidak adanya kepastian hukum. Untuk perijinan sendiri, hampir sebagian besar tidak ada biaya perijinan dan jangka waktu pembuatan perijinan maksimal lima hari, tergantung dari dinas teknisnya. Permasalahan berikutnya adalah Pemerintah Kabupaten Balangan Belum memiliki KAPET (Kawasan Ekonomi Terpadu) yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk memasarkan investasi kepada Investor baik itu investor lokal maupun investor Asing. Selain itu sesuai dengan Peraturan Menteri

PANRB No. 23/2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik maka DPMPTSP perlu membuat Mal Pelayanan Publik dalam rangka memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau.

Secara garis besar ada beberapa permasalahan - permasalahan yang selama ini dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan adalah :

1. Investasi saat ini mengarah ke dua sektor utama yakni Pertambangan (untuk PMA) dan Jasa Lainnya (untuk PMDN). kedua sektor ini hingga saat ini hampir tidak memiliki keterkaitan ke depan maupun ke belakang (multiplier-nya terhadap kesejahteraan masyarakat rendah).
2. Belum ada Peraturan Daerah yang membahas mengenai investasi (Kepastian Hukum Investasi).
3. Belum memiliki KAPET (Kawasan Ekonomi Terpadu) yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk memasarkan investasi kepada Investor baik itu investor lokal maupun investor Asing.
4. Mal Pelayanan Publik dalam rangka memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau.

Tabel 3.1 (T-B.35.)

**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Rendahnya dan kurang berkembangnya sektor ekonomi non tambang (ekonomi lokal)	Pertumbuhan Investasi yang Berfluktuasi dan Kualitas Investasi yang belum optimal	Investasi saat ini mengarah ke dua sektor utama yakni Pertambangan (untuk PMA) dan Jasa Lainnya (untuk PMDN). kedua sektor ini hingga saat ini hampir tidak memiliki keterkaitan ke depan maupun ke belakang (multiplier-nya terhadap kesejahteraan masyarakat rendah).
			Belum ada Peraturan Daerah yang membahas mengenai investasi (Kepastian Hukum Investasi)
			Belum memiliki KAPET (Kawasan Ekonomi Terpadu) yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk memasarkan investasi kepada Investor baik itu investor lokal maupun investor Asing
			Mal Pelayanan Publik dalam rangka memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau

3.1.2. Permasalahan Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Ketransmigrasian dan ketenagakerjaan merupakan salah satu bidang pembangunan yang sangat luas cakupannya. Ketenagakerjaan mencakup segala sesuatu yang mempunyai kaitan dengan tenaga kerja.

Isu strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan analisis terhadap situasi dan kondisi urusan Ketransmigrasian dan Ketenagakerjaan di Kabupaten Balangan.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja mempunyai tugas dan tantangan berat di masa depan. Sebagai institute yang diharapkan mampu menjadi ujung tombak pengurangan pengangguran, perannya

diharapkan menjadi optimal. Banyak tantangan yang dihadapi dan tuntutan yang harus dipenuhi.

Situasi perekenomian mempunyai pengaruh langsung dan signifikan terhadap bidang ketenagakerjaan melalui penciptaan lapangan kerja dan penurunan pengangguran. Perlu dilakukan iklim investasi yang kondusif untuk bisa membuka dan memperluas lapangan pekerjaan.

Sumberdaya manusia yang ada di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan yang terdiri atas pejabat struktural dan fungsional (instruktur pelatihan kerja) merupakan salah satu potensi dalam melaksanakan kebijakan dan program pembangunan bidang ketransmigrasian dan ketenagakerjaan, sekaligus sebagai salah satu faktor yang menentukan dalam meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan. Namun disadari, bahwa kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang tersedia masih perlu dikembangkan dan ditambah sehingga dapat melaksanakan kebijakan dan program pembangunan secara optimal.

Peran dan fungsi Balai Latihan Kerja (BLK) diharapkan lebih optimal lagi dalam rangka mengatasi masalah pengangguran. Para pencari kerja yang tidak memiliki keterampilan dan kurang berkompetensi di dunia kerja masih cukup tinggi. Ke depan BLK diharapkan tidak hanya menjadi lembaga pelatihan tetapi juga sebagai lembaga sertifikasi dan penempatan (Three in one).

Persoalan data seringkali menjadi kendala dalam merencanakan program, kegiatan dan kebijakan. Data belum tersaji secara sempurna, efektif dan melembaga. Kesulitan dalam mencari data yang akurat sampai tingkat Desa menjadi persoalan tersendiri.

Pada akhirnya pengangguran masih relatif tinggi, apalagi kalau yang dibicarakan adalah kelompok setengah penganggur. Di sini dapat diartikan bahwa banyak tenaga kerja yang bekerja tetapi tetap miskin karena produktivitasnya rendah atau penghasilannya kecil dan tidak mencukupi kebutuhan hidup keluarganya.

Adapun permasalahan-permasalahan yang ada, yang dihadapi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Kabupaten Balangan dalam pembangunan Ketransmigrasian dan Ketenagakerjaan kaitan dengan tugas dan fungsi , yaitu :

1. Lahan yang diberikan kepada warga transmigran kurang layak;
2. Masih tersedianya lahan yang belum dimanfaatkan secara maksimal;
3. Masyarakat transmigran sebagian besar belum mandiri secara ekonomi;
4. Sulitnya memenuhi persyaratan untuk pengembangan kawasan transmigrasi baru;
5. Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka dan setengah pengangguran;
6. Masih kurangnya pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi dan masyarakat;
7. Kesempatan kerja / lapangan pekerjaan yang terbatas;
8. Pendidikan dan keterampilan angkatan kerja masih rendah;
9. Pendidikan dan keterampilan yang ada belum sesuai dengan lowongan kerja yang tersedia.
10. Rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;
11. Masih kurangnya sarana prasarana pelatihan;
12. Masih kurangnya pemahaman pekerja dan pengusaha mengenai perundang-undangan ketenagakerjaan;
13. Masih adanya perusahaan yang belum mentaati peraturan ketenagakerjaan dan syarat kerja;

Berpijak dari hal tersebut di atas, secara lebih jelas identifikasi permasalahan di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan sesuai tugas dan fungsi pelayanan dapat diuraikan antara lain sebagai berikut :

1. Update data belum bisa efektif dilaksanakan; perlu intervensi semua pihak stakeholder dan aparat pemerintah desa untuk menghasilkan data yang akurat.
2. Kurangnya sarana prasarana, peralatan praktek pada bidang-bidang juga di BLK, sebagai lembaga yang diharapkan menjadi fungsi pelatihan, sertifikasi, dan penempatan;
3. Kualifikasi Tenaga Kerja yang dibutuhkan tidak memenuhi syarat yang dibutuhkan pasar kerja;
5. Produktivitas tenaga kerja kurang diperlukan program pelatihan secara berkelanjutan;

3.2 Telaahan terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah

Pengertian visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan misi adalah bagaimana visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan tujuan serta sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta indicator-indikatornya.

3.2.1. Visi

Visi Pemerintah Kabupaten Balangan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yaitu :

“MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA”.

Makna dari Visi tersebut adalah :

1. Membangun Desa, yakni mengembangkan kawasan pedesaan dan konektivitasnya di Kabupaten Balangan.
2. Menata Kota, yakni menata kawasan perkotaan di Kabupaten Balangan.
3. Maju dan dan Sejahtera, yakni mewujudkan dan meningkatkan IPM di Kabupaten Balangan.

3.2.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu, sebuah visi belum dapat dikatakan sempurna tanpa adanya serangkaian misi yang berfungsi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Balangan dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai Visi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur pedesaan dan perkotaan;
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif;
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan;
4. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara;

5. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif.

Dalam implementasi seluruh jenis pelayanan dan tugas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan sesuai dengan misi kedua yaitu :

“Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan, pariwisata dan ekonomi kreatif”

Misi ini dilandasi oleh kondisi perekonomian daerah Balangan yang masih didominasi sektor pertambangan, sedangkan sektor pertanian, perdagangan, perindustrian dan pariwisata masih sangat terbatas. Hal ini mengharuskan daerah berusaha meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif.

Dan Misi keempat yaitu :

“Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara”

Misi ini di landasi kondisi masih rendahnya Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) di lingkungan pemerintahan Kabupaten Balangan sehingga mengharuskan daerah untuk meningkatkan IRB dalam rangka meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara.

3.3 Telaahan Visi dan Misi RPJM Daerah 2021 – 2026

Sesuai Visi Pemerintah Kabupaten Balangan di Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, yaitu dengan memprioritaskan “Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan dan Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka “, maka dapat ditarik benang merah bahwa peran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan mempunyai peran yang cukup penting dan strategis dalam pencapaian Visi dan Misi Bupati, yaitu meningkatkan nilai investasi penanaman modal dan mewujudkan Tenaga Kerja yang terampil untuk bersaing pada pasar kerja dan mensejahterakan masyarakat di kawasan transmigrasi dan meningkatkan PAD.

3.4 Telaahan Renstra

1. Mengacu pada arah kebijakan RPJMN 2020 – 2024 yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengacu pada arah kebijakan RPJMD 2021 – 2026 yaitu Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian, perkebunan dan pariwisata, serta ekonomi kreatif.
3. Mengacu pada arah kebijakan RPJPD yaitu Mewujudkan ketahanan ekonomi dengan berbasis kerakyatan dalam rangka mewujudkan perekonomian daerah yang sejahtera, mandiri dan berkelanjutan, dengan didukung oleh Sumber Daya Alam yang tersedia, pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang didukung SDM yang handal.

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RT/RW) merupakan salah satu dokumen yang menjadi pedoman bagi penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan. Dalam Rencana Tata Ruang Wlayah (RTRW) Kabupaten Balangan tahun 2013 sd 2032 ditetapkan bahwa tujuan dari penataan Kabupaten Balangan adalah terwujudnya wilayah Balangan yang sejahtera, aman, nyaman, dan produktif melalui pengembangan sektor-sektor unggulan yang berwawasan lingkungan dalam pemanfaatan ruang.

Untuk menjabarkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud, disusunlah kebijakan penataan ruang yang terdiri atas :

1. Pengembangan sistem agropolitan untuk mendorong potensi ekonomi berbasis pertanian dan perkebunan serta peternakan;
2. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah secara hirarkhis dan merata;
3. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana dan sarana;
4. Pengembangan kawasan strategis Kabupaten;
5. Pengembangan wisata alam maupun budaya unggulan yang berskala regional;

6. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup melalui pengembangan kawasan lindung; dan
7. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara

Berdasarkan Review Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Balangan dalam naskah Rencana Umum Penanaman Modal maka terlihat pada sektor perekonomian terdapat kawasan perdagangan dan jasa, hubungannya dengan investasi adalah tersedianya lahan untuk usaha dan perdagangan di kota paringin salah satunya tumbuhnya investor untuk toko modern yaitu investor alfamart 1 buah pada 2016 dan 1 buah lagi di 2017 di batu piring paringin.

Dari sektor perkebunan sasaran investasi adalah investor untuk perkebunan karet, serta dengan diaturnya dalah RTRW untuk kawasan pemukiman dapat mejadi sasaran untuk investasi dalam pembangunan perumahan yang setiap tahun terus meningkat.

Sektor- sektor yang menjadi fokus pada 5 tahun kedepan berdasarkan RTRW Kab.Balangan adalah :

1. Sektor perdagangan dan jasa (toko modern)
2. Sektor Pemukiman (perumahan)
3. Sektor Perkebunan (perkebunan Karet)
4. Sektor sosial (kawasan cagar budaya dan objek wisata di beberapa kecamatan)

Sesuai prinsip perencanaan pembangunan daerah, maka setiap perencanaan yang dilakukan harus mengacu kepada rencana tata ruang dan wilayah. Sedangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipasif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah. Dengan demikian di dalam mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah maka Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan secara khusus ada keterkaitan langsung dan pembahasan secara mendalam dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Balangan, yaitu dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat Balangan.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Balangan mengarahkan pembangunan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan.

Sejauh ini belum ada aturan yang jelas tentang RTRW yang mengatur masalah ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Secara tidak langsung Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja tidak terlibat, namun pada kondisi lapangan hal tersebut perlu dipertimbangkan kembali, agar arah Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian dapat tepat sasaran.

Untuk pembangunan bidang Ketransmigrasian, kawasan transmigrasi pada hakekatnya merupakan kawasan pemukiman dengan kegiatan bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan maupun kehutanan serta kegiatan usaha ekonomi lainnya, sehingga di dalam pemetaan wilayahnya juga belum diatur secara khusus.

3.6 Penentuan Isu- Isu Strategis

Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, karena tahap ini akan diketahui apakah tantangan utama yang harus diselesaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah selama 5 (Lima) tahun ke depan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya, serta dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dalam menentukan isu strategis, maka dapat diidentifikasi isu strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Masyarakat
2. Melaksanakan Koordinasi secara berkelanjutan dengan SKPD terkait
3. Meningkatkan Iklim Penanaman Modal Daerah.
4. Mewujudkan Pelayanan Perizinan yang berkualitas.
5. Peningkatan tenaga kerja yang terampil, produktif, berkompeten dan tersertifikasi.

6. Optimalisasi Balai Latihan Kerja dengan meningkatkan Infrastruktur, sarana prasarana pelatihan dan kapasitas instruktur.
7. Peningkatan penyerapan tenaga kerja melalui penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja.
8. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dan pengusaha.
9. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan transmigrasi dan kualitas rombongan transmigran melalui pelatihan dan pengembangan produktivitas, pengolahan lahan dan pengembangan perekonomian.

Berdasarkan Capaian Kinerja Pembangunan Tahun 2016-2021, juga melihat fakta permasalahan yang krusial dan tantangan pada tahun 2021-2026, maka dapat digambarkan perumusan isu strategis ketenagakerjaan :

1. Ketidakesesuaian antara kualifikasi jabatan lowongan kerja dengan bakat, minat, dan kemampuan pencari kerja;
2. Terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia;
3. Tingginya pelanggaran norma ketenagakerjaan, dan meningkatnya kasus perselisihan hubungan industrial;
4. Terbatasnya lokasi transmigrasi.

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran Startegis dapat ditempuh melalui :

1. Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja yang berupa peningkatan pembentukan dan pengembangan tenaga kerja yang berkualitas, produktif, efisien dan berjiwa wirausaha;
2. Meningkatkan tenaga kerja yang semakin berkualitas dan meningkatkan daya saing;
3. Meningkatkan keahlian, keterampilan pencari kerja dan peningkatan Penempatan bagi pencari kerja;
4. Meningkatkan kesempatan kerja terutama di sektor informal serta dan mendorong produktivitas;
5. Mengembangkan pasar kerja melalui peningkatan kegiatan dan pendapatan masyarakat, terutama masyarakat ekonomi lemah;
6. Meningkatkan Perlindungan tenaga kerja melalui peningkatan kepesertaan jamsostek;

7. Meningkatkan harmonisasi Hubungan Industrial dengan meningkatkan Bimtek Perundang-undangan Ketenagakerjaan, Peningkatan Fungsi LKS Tripartit, Peningkatan sarana hubungan industrial, mendorong peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, peningkatan kelembagaan organisasi serikat pekerja, peningkatan Kelembagaan Bipartid dan penetapan upah minimum;
8. Meningkatkan kecepatan penyelesaian ketenagakerjaan, dan pencegahan kasus ketenagakerjaan melalui peningkatan pembinaan teknis penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan peningkatan harmonisasi hubungan kerja.
9. Meningkatkan pengembangan kawasan transmigrasi.

Berdasarkan analisis lingkungan strategis ditentukan strategi:

1. Meningkatkan Keterampilan dan Produktivitas Pencari kerja Merupakan strategi dalam mengurangi tingkat pengangguran yang hingga saat ini masih menjadi permasalahan strategis, dalam kenyataan bahwa tingkat keterampilan dan keahlian para pencari kerja di Kabupaten Balangan ini masih relatif kurang, hal ini dibuktikan dalam perebutan peluang pasar kerja di sektor formal sedikit sekali yang terserap oleh karena demikian dalam hal penempatan tersebut tidak hanya di sektor formal saja tapi harus diimbangi melalui penempatan sektor informal dan pembentukan Usaha Mandiri, untuk menjangkau kondisi yang demikian tersebut diawali pemberian pelatihan-pelatihan terhadap penguasaan salah satu penerapan teknologi.
2. Meningkatkan Pendayagunaan dan Penyebaran Tenaga Kerja Strategi untuk pendayagunaan serta penyebaran tenaga kerja berkaitan erat dengan percepatan serta pemerataan pembangunan, selaras dengan fungsi tata ruang, untuk hal tersebut perlu didukung oleh ketersediaan tenaga kerja yang produktif baik dari segi kualitas dan kuantitas sehingga akan terhindar atau paling dapat dibatasi penumpukan tenaga kerja di satu tempat, sementara di tempat lain kekurangan tenaga kerja.
3. Mengembangkan Sistem Informasi Pasar Kerja
Salah satu masalah yang di hadapi terjadinya penganggur dikarenakan kurang baik dan sempurnanya sistem informasi pasar kerja terutama informasi mengenai lowongan kerja, untuk mengatasi hal seperti demikian maka

strategi yang harus ditempuh adalah menyempurnakan sistem informasi pasar kerja dengan pengembangan luas cakupannya dengan memanfaatkan media yang paling banyak dimanfaatkan oleh pencari kerja melalui media Bursa Kerja Online.

4. Meningkatkan Ketenangan dan Kemajuan Berusaha

Sebagai pelaku ekonomi perusahaan swasta memiliki kontribusi yang sangat penting dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi, oleh sebab itu ketenangan dalam berusaha bagi pengusaha adalah ketenangan bekerja bagi pekerja mutlak dibutuhkan untuk itu perlu diambil strategi kebijakan melalui perwujudan hubungan kerja yang serasi, harmonis dan dinamis. Untuk mencapai itu, semua yang harus di tempuh adalah melaksanakan secara bersungguh-sungguh semua hak dan kewajiban masing-masing antar pekerja dan pengusaha yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui sosialisasi bimbingan teknis.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan dan sasaran dalam penerapan perencanaan strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan adalah dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang harus dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa pembuatan tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan selama lima tahun ke depan tidaklah lepas dari tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Balangan tahun 2021-2026 yang ada pada Misi II dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif dan Misi IV yaitu Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara.

Adapun tujuan dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan selama lima tahun ke depan adalah

1. Terwujudnya investasi daerah yang berkelanjutan
2. Meningkatkan daya saing tenaga kerja
3. Mewujudkan pelayanan perizinan yang berkualitas

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan selama lima tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya investasi daerah;
2. Menurunnya angka pengangguran terbuka (TPT);
3. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan.

Tabel 4.1 (T-C.25)

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja

NO. (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	INDIKATOR (4)	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terwujudnya investasi daerah yang berkelanjutan	Meningkatnya investasi daerah	Realisasi investasi	227,29 M	238,65 M	250,59 M	263,12 M	276,27 M	290,09 M
2	Menurunnya angka pengangguran terbuka	Menurunnya angka pengangguran terbuka (TPT)	Angka pengangguran terbuka	2.46	2.43	2.40	2.37	2.34	2.30
3	Mewujudkan pelayanan perizinan yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMPTSPTTK	87	87,50	88	88,50	89	89,50

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

1. Peningkatan kepastian hukum terkait investasi dan usaha
2. Pemberian insentif dan fasilitasi investasi (berupa: insentif fiskal dan non fiskal) yang lebih selektif dan proses yang transparan
3. Meningkatkan tenaga kerja yang semakin berkualitas dan meningkatkan daya saing.
4. Meningkatkan keahlian, keterampilan pencari kerja
5. Meningkatkan kesempatan kerja terutama disektor informal serta dan mendorong produktivitas
6. Penyederhanaan prosedur perizinan investasi dan usaha di pusat dan daerah, terutama untuk sektor pengolahan dan jasa
7. Pengembangan layanan investasi yang memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses perizinan bagi investor dan pengusaha.

5.2 Kebijakan

1. Meningkatkan promosi dan pengawasan investasi penanaman Modal asing dan dalam negeri
2. Peningkatan Investasi yang inklusif terutama dari investor domestik.
3. Melakukan kerjasama dengan pihak-pihak perusahaan penerima tenaga kerja
4. Melakukan kerjasama dengan SKPD teknis dalam rangka pelatihan-pelatihan di bidang pertanian, perkebunan dan lainnya
5. Melakukan sosialisasi tentang ketenagakerjaan dan peningkatan kreativitas dan produktivitas LPK
6. Menyederhanakan prosedur perizinan
7. Mempersingkat waktu pelayanan
8. Mengoptimalkan pelayanan perizinan berbasis online

Tabel 5.1 (T-C.26)
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA			
MISI II : Meningkatnya perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Terwujudnya investasi daerah yang berkelanjutan	1. Meningkatnya investasi daerah	1.1 Peningkatan kepastian hukum terkait investasi dan usaha	1.1. Meningkatkan promosi dan pengawasan investasi penanaman Modal asing dan dalam negeri
		1.2. Pemberian insentif dan fasilitasi investasi (berupa: insentif fiskal dan non fiskal) yang lebih selektif dan proses yang transparan	1.2. Peningkatan Investasi yang inklusif terutama dari investor domestik.
2. Meningkatkan daya saing tenaga kerja	2. Menurunnya angka pengangguran terbuka (TPT)	2.1. Meningkatkan tenaga kerja yang semakin berkualitas dan meningkatkan daya saing.	2.1. Melakukan kerjasama dengan pihak-pihak perusahaan penerima tenaga kerja
		2.2. Meningkatkan keahlian, keterampilan pencari kerja	2.2. Melakukan kerjasama dengan SKPD teknis dalam rangka pelatihan-pelatihan di bidang pertanian, perkebunan dan lainnya
		2.3. Meningkatkan kesempatan kerja terutama disektor informal serta dan mendorong produktivitas	2.3. Melakukan sosialisasi tentang ketenagakerjaan dan peningkatan kreativitas dan produktivitas LPK

MISI IV : Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
3. Mewujudkan pelayanan perizinan yang berkualitas	3. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	3.1. Penyederhanaan prosedur perizinan investasi dan usaha di pusat dan daerah, terutama untuk sektor pengolahan dan jasa	3.1. Menyederhanakan prosedur perizinan
			3.2. Mempersingkat waktu pelayanan
		3.2. Pengembangan layanan investasi yang memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses perizinan bagi investor dan pengusaha	3.3. Mengoptimalkan pelayanan perizinan berbasis online

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan penjelasan terhadap strategi dan kebijakan yang akan dilakukan untuk pencapaian sasaran maka rencana program, kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif dapat dilihat sebagai berikut :

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Pada periode renstra 2016 – 2021 ada beberapa 12 program dan 22 kegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan

Pemeriksaan

- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 7) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

C. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

D. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

E. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan

- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 2) Pengadaan Mebel
- 3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

F. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

G. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

A. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

- 1) Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
- 2) Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

B. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

- 1) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

3. Program Promosi Penanaman Modal

A. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

- 1) Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
- 2) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

A. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan

- 1) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- 2) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
- 3) Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
- 4) Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

A. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
- 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

A. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non

Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

- 1) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

7. Program Perencanaan Tenaga Kerja

A. Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)

Sub Kegiatan

- 1) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro

8. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

A. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi

Sub Kegiatan

- 1) Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
- 2) Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
- 3) Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota

B. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Sub Kegiatan

- 1) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

C. Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil

Sub Kegiatan

- 1) Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil

9. Program Penempatan Tenaga Kerja

A. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

- 1) Pelayanan antar Kerja
- 2) Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
- 3) Perluasan Kesempatan Kerja

10. Program Hubungan Industrial

A. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

- 1) Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan

B. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

- 1) Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

11. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

A. Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

- 1) Penyuluhan Transmigrasi

12. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

A. Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian

Sub Kegiatan

- 1) Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman
- 2) Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman

6.2 Pendanaan Indikatif

Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang telah dirumuskan disajikan menggunakan Tabel TC. 27 (Terlampir).

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2021 s.d 2026

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal merupakan program prioritas dengan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Ada 3 Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Penanaman Modal
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Penanaman Modal
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Penanaman Modal

Anggaran tersebut bersumber dari APBD Murni, Dana Alokasi Khusus non fisik Sub Kegiatan tersebut melibatkan Narasumber dari BPKPM, DPMPTSP Prov. Kalsel, serta peserta dari SKPD lain, pihak ketiga dan pelaku usaha.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan merupakan rencana 5 (Lima) tahun yang menggambarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan juga Prioritas maupun tujuan dan sasaran secara terukur yang bertujuan untuk memudahkan dalam pertanggungjawaban dan juga sebagai pedoman dalam melaksanakan Program tahunan sampai lima tahun dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang saat ini dan memprediksikannya pada keadaan yang akan datang.

Untuk dapat melihat Indikator Kinerja yang ada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tersebut di atas, maka dapat dilihat pada Tabel 7.1 :

Tabel 7.1 (T-C.28)

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Realisasi investasi	216,47 M	227,29 M	238,65 M	250,59 M	263,12 M	276,27 M	1,26 T
2	Angka pengangguran terbuka	2,46%	2.46	2.43	2.40	2.37	2.34	2.34
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMPSTPTTK	88,50 Nilai	87	87,50	88	88,50	89	89

Salah satu indikator yang biasa digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah laju pertumbuhan angkatan kerja yang terserap pada lapangan pekerjaan. Tingginya angkatan kerja di suatu daerah secara langsung dapat menggerakkan perekonomian daerah tersebut. Hal sebaliknya dapat mengakibatkan timbulnya masalah sosial. Gambaran kondisi ketenagakerjaan seperti persentase angkatan kerja yang bekerja dan distribusi lapangan pekerjaan sangat berguna dalam melihat prospek ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat apakah benar-benar digerakan oleh produksi yang melibatkan tenaga kerja daerah atau karena pengaruh faktor lain. Banyaknya penduduk yang bekerja akan berdampak pada peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan penduduk sangat menentukan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak (peningkatan kemampuan daya beli).

BAB VIII

PENUTUP

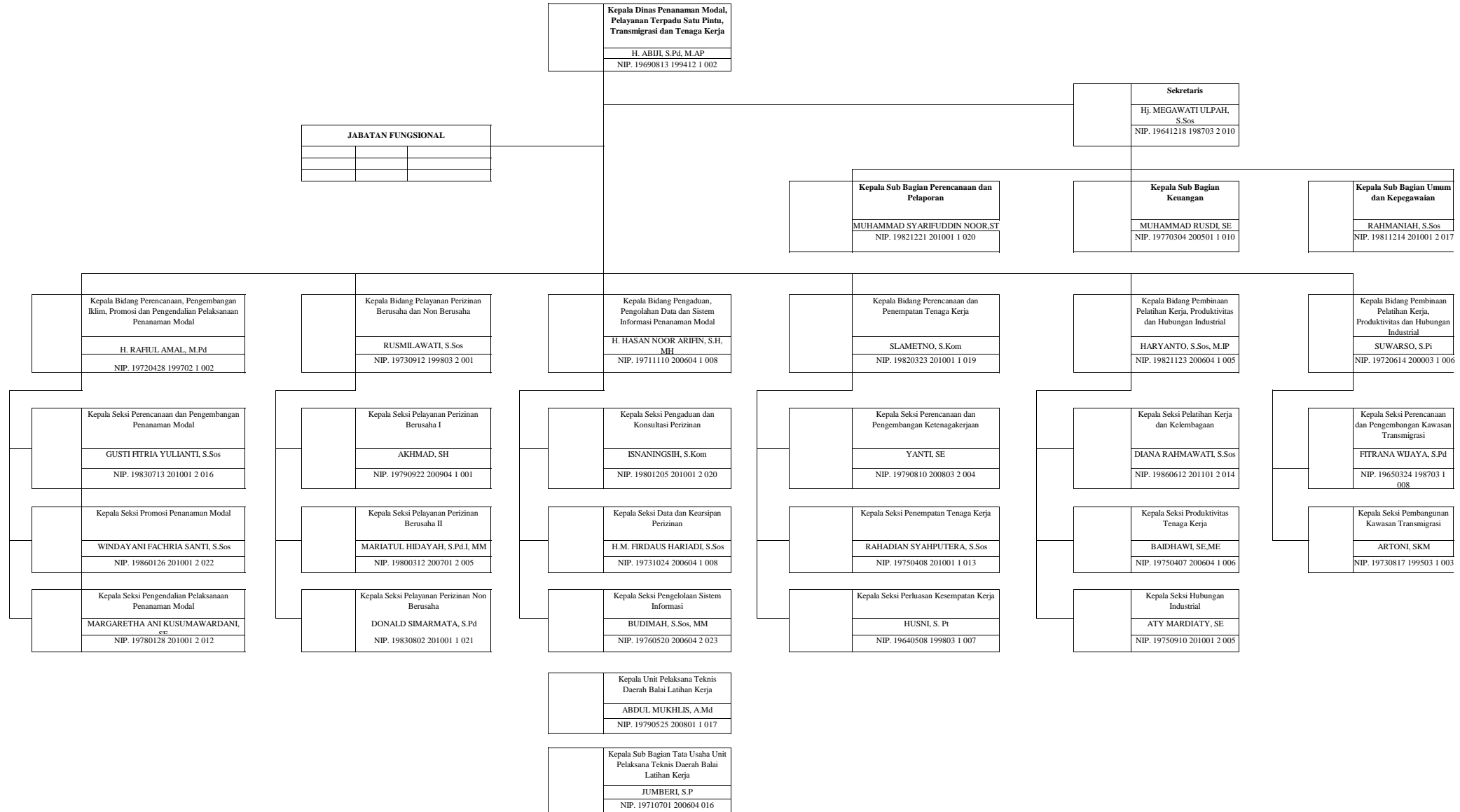
Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan adalah Rencana Kerja dalam jangka pendek maupun jangka menengah serta dalam rangka mewujudkan visi dan menyelenggarakan misi pengembangan sektor penanaman modal, ketransmigrasian dan ketenagakerjaan Kabupaten Balangan.

Untuk mendukung rencana tersebut diatas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan Kerja telah menetapkan tujuan, sasaran, kebijakan dan Program Prioritas yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas, standar pelayanan minimal dan merupakan penjabaran visi dan misi pengembangan sektor penanaman modal, ketransmigrasian dan Ketenagakerjaan maupun visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis ini, diharapkan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana sehingga tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan dapat tercapai.

LAMPIRAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU, SATU PINTU, DAN TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA



TUJUAN SKPD	
1. Tercapainya investasi daerah yang berkualitas	
2. Merumusnya angka pengangguran terbuka	
3. Menajudikan pelayanan perikanan yang berkualitas	
INDIKATOR TUJUAN	
1. Perentase pertinggalan investasi daerah	
2. Angka pengangguran terbuka	
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) OPMP/PTPTK	

INDIKAS UTAMA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	TARGET ANHUS BERSUKA	INISITATIVE	PENANGGUNG JAWAB
1. Meningkatkan investasi daerah	1. Realisasi investasi	1,26 T	1.1. Pengalangan investasi tahun terkait investasi dan usaha 1.2. Anjungan investasi dan bidang investasi (dan unit investasi) dan non-UMK yang lebih efektif dan efisien pada khususnya	Bidang Perikanan, Madya, Pelayaran, Turisme, Kota, Pora, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2. Merumusnya angka pengangguran terbuka (PT)	2. Angka pengangguran terbuka	2,34	2.1. Mengembangkan tenaga kerja yang terampil berkualitas dan meningkatkan daya saing 2.2. Mengembangkan keahlian, keterampilan personalitas 2.3. Meningkatkan kesempatan kerja terutama di sektor informal serta dari pencadangan produktifitas	
3. Meningkatkan kualitas pelayanan perikanan	3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) OPMP/PTPTK	89	3.1. Pengalangan pelayanan perikanan investasi dan non-UMK yang lebih efektif dan efisien 3.2. Pengembangan layanan perikanan yang berkualitas, berkualitas, tepat, dan meningkatkan proses perikanan bagi investor dan pengembang	

INDIKAS UTAMA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	TARGET ANHUS BERSUKA	INISITATIVE	PENANGGUNG JAWAB
1. Meningkatkan Pengembangan KIRP Perikanan Madya	1.2 Jumlah Kegiatan Perikanan Usaha Kecil 1.2 Jumlah Persepsi Investasi Daerah yang dapat dikembangkan telah digambarkan Kategori investasi dan OH	12 kegiatan Kategori investasi dan OH	Menyediakan kerjasama antar pelaku usaha Menggali potensi pasar yang dapat dikembangkan	Bidang Perikanan, Pengembangan KIRP, Perikanan dan Pengalangan, Pelayaran Perikanan Madya
2. Meningkatkan Persepsi Perikanan Madya	2. Nilai Persepsi Investasi/ Madya Investasi 1.1. Nilai Persepsi	1.1. Nilai Persepsi	Menyediakan persepsi perikanan madya	
3. Meningkatkan Pengalangan Perikanan Perikanan Madya	3. Persepsi Pengalangan Perikanan Perikanan Madya 1.00%	1.00%	Menyediakan pengalangan KIRP	

INDIKAS UTAMA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	TARGET ANHUS BERSUKA	INISITATIVE	PENANGGUNG JAWAB
1. Meningkatkan Investasi Kegiatan yang Mengalangan	1. Persepsi kegiatan yang dikemukakan yang Mengalangan Investasi Kegiatan Kerja 1.1. Meningkatkan Investasi Kegiatan Kerja	10%	1.1. Meningkatkan Investasi Kegiatan Kerja 1.2. Meningkatkan Investasi Kegiatan Kerja dan Persepsi Investasi Kegiatan Kerja 1.3. Meningkatkan Investasi Kegiatan Kerja dan Persepsi Investasi Kegiatan Kerja	Bidang Perikanan dan Pengembangan Tenaga Kerja
2. Meningkatkan Persepsi Kegiatan Kerja	2. Persepsi Persepsi Kegiatan Kerja dan Persepsi Investasi Kegiatan Kerja 65%	65%	1.1. Meningkatkan Persepsi Kegiatan Kerja dan Persepsi Investasi Kegiatan Kerja 1.2. Meningkatkan Persepsi Kegiatan Kerja dan Persepsi Investasi Kegiatan Kerja 1.3. Meningkatkan Persepsi Kegiatan Kerja dan Persepsi Investasi Kegiatan Kerja	

INDIKAS UTAMA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	TARGET ANHUS BERSUKA	INISITATIVE	PENANGGUNG JAWAB
1. Meningkatkan perantara yang terampil	1. Persepsi tenaga kerja yang terampil/keterampilan kompetensi 1.1. Persepsi PHN yang efektif 1.2. Persepsi PHN yang efektif	8%	1.1. Meningkatkan perantara yang terampil/keterampilan kompetensi 1.2. Meningkatkan perantara yang terampil/keterampilan kompetensi 1.3. Meningkatkan perantara yang terampil/keterampilan kompetensi	Bidang Perikanan Pelayaran, Madya, Perikanan dan Pengembangan Hubungan Industri
2. Meningkatkan perantara yang terampil/keterampilan kompetensi	2. Persepsi perantara yang terampil/keterampilan kompetensi 100%	100%	2.1. Meningkatkan perantara yang terampil/keterampilan kompetensi 2.2. Meningkatkan perantara yang terampil/keterampilan kompetensi 2.3. Meningkatkan perantara yang terampil/keterampilan kompetensi	

INDIKAS UTAMA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	TARGET ANHUS BERSUKA	INISITATIVE	PENANGGUNG JAWAB
1. Meningkatkan angka transmigrasi yang terampil	1. Persepsi angka transmigrasi yang terampil 1.1. Persepsi PHN yang efektif 1.2. Persepsi PHN yang efektif	70%	1.1. Meningkatkan angka transmigrasi yang terampil/keterampilan kompetensi 1.2. Meningkatkan angka transmigrasi yang terampil/keterampilan kompetensi 1.3. Meningkatkan angka transmigrasi yang terampil/keterampilan kompetensi	Bidang Transmigrasi
2. Meningkatkan Pengembangan Perikanan Transmigrasi	2. Persepsi Pengembangan Perikanan Transmigrasi 18,50%	18,50%	2.1. Meningkatkan Pengembangan Perikanan Transmigrasi 2.2. Meningkatkan Pengembangan Perikanan Transmigrasi 2.3. Meningkatkan Pengembangan Perikanan Transmigrasi	

INDIKAS UTAMA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	TARGET ANHUS BERSUKA	INISITATIVE	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatkan Kualitas Investasi Perikanan	1. Persepsi Persepsi Perikanan dan Non Perikanan investasi KIRP 1. Persepsi Persepsi Perikanan dan Non Perikanan investasi KIRP	100%	1.1. Meningkatkan Kualitas Investasi Perikanan 1.2. Meningkatkan Kualitas Investasi Perikanan 1.3. Meningkatkan Kualitas Investasi Perikanan	Bidang Perikanan Perikanan Madya dan Non Perikanan
	2. Persepsi Persepsi Perikanan dan Non Perikanan investasi KIRP 100%	100%	2.1. Meningkatkan Kualitas Investasi Perikanan 2.2. Meningkatkan Kualitas Investasi Perikanan 2.3. Meningkatkan Kualitas Investasi Perikanan	

INDIKAS UTAMA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	TARGET ANHUS BERSUKA	INISITATIVE	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Persepsi Madya dan Perikanan Madya	Persepsi Madya dan Perikanan Madya 100%	100%	Meningkatkan perikanan madya dan perikanan madya	Bidang Perikanan Perikanan Madya dan Non Perikanan
	1. Persepsi Persepsi Madya dan Perikanan Madya 100%	100%	1.1. Meningkatkan Persepsi Madya dan Perikanan Madya 1.2. Meningkatkan Persepsi Madya dan Perikanan Madya 1.3. Meningkatkan Persepsi Madya dan Perikanan Madya	

INDIKAS UTAMA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	TARGET ANHUS BERSUKA	INISITATIVE	PENANGGUNG JAWAB
1. Meningkatkan Kualitas Perikanan dan Pelayaran Madya	1. Nilai Akumulatif Investasi Madya 69 (6)	69 (6)	Meningkatkan Kualitas Perikanan dan Pelayaran Madya	Bidang Perikanan Perikanan Madya dan Non Perikanan
2. Meningkatkan Persepsi Perikanan dan Pelayaran Madya	2. Persepsi Persepsi Perikanan dan Pelayaran Madya 90%	90%	2.1. Meningkatkan Persepsi Perikanan dan Pelayaran Madya 2.2. Meningkatkan Persepsi Perikanan dan Pelayaran Madya 2.3. Meningkatkan Persepsi Perikanan dan Pelayaran Madya	

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kabupaten / Kota : Balangan / Paringin

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi				Keterangan
		Materi		Faktor Penyebab	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak	
		Ada	Tidak Ada	Ketidak Sesuaian		
1	2	3	4	5	6	
1	Pembentukan tim penyusunan Renstra Perangkat Daerah	√				SK Kepala Dinas DPMPSTPTK Tahun 2021
2	Penyiapan data dan informasi	√				persiapan dilaksanakan setelah pembentukan Tim dan penyusunan jadwal kerja
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota	√				bab II Renstra DPMPSTPTK 2021-2026 (2.3)
4	Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi	√				bab III Renstra DPMPSTPTK 2021-2026 (3.5)
5	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota	√				bab III Renstra DPMPSTPTK 2021-2026 (3.5)
6	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota	√				bab III Renstra DPMPSTPTK 2021-2026
7	Perumusan isu-isu strategis	√				Bab III Renstra DPMPSTPTK (3.5)
8	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota	√		Visi dan misi langsung kepada visi dan misi Kepala Daerah		Bab III Renstra DPMPSTPTK (3.2)
9	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah	√		Visi dan misi langsung kepada visi dan misi Kepala Daerah		Bab III Renstra DPMPSTPTK
10	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota	√				Bab IV Renstra DPMPSTPTK (4.1) tabel 4.1
11	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota	√				Bab IV Renstra DPMPSTPTK (4.1) tabel 4.1
12	Mempelajari Surat Edaran Bupati/Wali kota perihal Penyusunan Rancangan Renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD kabupaten/kota yang memuat indikator keluaran program dan pagu perPerangkat Daerah kabupaten/kota	√				
13	Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota	√				Bab V Renstra DPMPSTPTK tabel Tc. 26
14	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan	√				Bab VI Renstra DPMPSTPTK Tc. 27
15	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten/kota	√				Bab VII Renstra DPMPSTPTK Tc. 28
16	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota	√				penyusunan Ranwal dan Rancangan akhir di dokumentasikan dalam bentuk BA
17	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah	√				Tc. 27 , Surat Bappeda tentang pagu indikatif, ranwal RPJMD
18	Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota	√				
19	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kabupaten/kotasesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.	√		Jadwal Pelaksanaan		agenda Tim penyusunan Renstra menyesuaikan dengann agenda Penyusunan RPJMD
20	Dokumen Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disahkan	√				siap di sah kan

Lampiran 3

Formulir E. 73

n dan Evaluasi terhadap Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigra

Kabupaten / Kota : Balangan/Parangin

Periode Renstra Perangkat Daerah : 2021 - 2026

RPJMD Kabupaten / Kota :	RENSTRAPERANGKAT Daerah Kabupaten/kota	Kesesuaian / Relevansi		Evaluasi	Tidak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
1	2	3a	3b	4	5	6
Visi dan misi		√		Visi dan Misi berada pada Bab III, sudah sesuai dengan visi dan misi RPJMD		
Tujuan dan sasaran	Tujuan dan sasaran	√		Tujuan dan Sasaran berada pada Bab IV, sudah sesuai dengan tujuan dan sasaran RPJMD		

Strategi dan kebijakan	Strategi dan kebijakan	√		Strategi dan Kebijakan berada pada Bab V, sudah sesuai dengan strategi dan kebijakan RPJMD		
Penetapan indikator kinerja daerah	Indikator kinerja dan sasaran Perangkat Daerah	√		Penetapan Indikator Kinerja Daerah berada pada Bab VII, sudah sesuai dengan indikator kinerja RPJMD		
Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan	Tujuan dan sasaran program dan kegiatan dan dana indikatif	√		Tujuan dan sasaran program dan kegiatan dan dana indikatif berada pada Bab VI		

RUMUSAN INDIKATOR KINERJA
RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 - 2026

A. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Makna Indikator	Alasan Memilih Indikator	Formulasi Perhitungan/Rumus	Sumber/Referensi Indikator	Sumber Data	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4		6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Investasi Daerah	Realisasi Investasi	Realisasi investasi tahunan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dimana menggambarkan perkembangan investasi berupa realisasi proyek yang ada di daerah (khususnya Kabupaten Balangan).	Realisasi investasi tahunan menggambarkan perkembangan investasi yang ada.	Angka realisasi investasi PMDN dijumlahkan dalam satuan Rupiah (Rp) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Adapun realisasi investasi didapat dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap perusahaan. LKPM dibuat setiap triwulan, sehingga dapat terlihat perkembangan realisasi pelaksanaan investasinya	Permendagri 86 Tahun 2017, Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Promosi PM dan Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi PM	Kepala DPMPTSP	
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perizinan	Dengan penyelesaian aduan/keluhan masyarakat tentang pelayanan perizinan maka diharapkan terjadi perbaikan/peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan dan tercapainya tingkat kepuasan masyarakat yang diinginkan.	Dengan adanya indikator tersebut untuk mengetahui sejauh mana layanan yang diberikan dan tetap terlaksananya pelayanan perizinan dan nonperizinan secara cepat, mudah, murah, transparan dan pasti.	a. Menyediakan kotak saran, ruang pengaduan, display touch screen Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan SMS Gateway; b. Diselesaikannya aduan/keluhan masyarakat terkait pelayanan perizinan; c. Tingkat pengaduan yang rendah relatif mencerminkan bahwa pemohon izin sudah puas terhadap pelayanan yang diberikan.	Permendagri 86 Tahun 2017, Dokumen IKM DPMPTSP	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	Kepala DPMPTSP	

A. PROGRAM

No.	Program	Indikator Kinerja	Makna Indikator	Alasan Memilih Indikator	Formulasi Perhitungan/Rumus	Sumber/Referensi Indikator	Sumber Data	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Potensi Investasi Daerah yang dapat dikembangkan untuk dipromosikan	Potensi investasi di Kabupaten Balangan yang tersedia yang dipilih untuk dikembangkan dan dipromosikan	Untuk mengetahui potensi daerah apa saja yang bisa dikembangkan untuk dipromosikan.	Jumlah Potensi Investasi Daerah yang dapat dikembangkan untuk dipromosikan	Permendagri 86 Tahun 2017, Dokumen Potensi Investasi Kab. Balangan	Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Promosi PM	Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Promosi PM	
2	Program Promosi Penanaman Modal	Nilai Persetujuan Investasi / Rencana Investasi	Nilai rencana investasi investor di Kabupaten Balangan	Untuk mengetahui nilai rencana investasi investor di Kabupaten Balangan	Jumlah nilai rencana investasi PMDN berdasarkan izin usaha yang diterbitkan	Permendagri 86 Tahun 2017, Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Promosi PM	Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Promosi PM	
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	Penerapan sistem manajemen mutu pelayanan sesuai SOP	Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Perizinan sesuai SOP dibagi Jumlah Perizinan yang dimohonkan masyarakat x 100 %	Permendagri 86 Tahun 2017, Perbup No. 16 Tahun 2021 tentang Standar operasional prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Permasalahan Perusahaan yang terselesaikan	Penyelesaian permasalahan perusahaan dalam menyampaikan laporan realisasi investasi	Membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan sehingga perusahaan dapat menyampaikan laporan realisasi investasi dengan tepat waktu	Jumlah penyelesaian permasalahan perusahaan dibagi jumlah permasalahan perusahaan x 100 %	Permendagri 86 Tahun 2017, Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi PM	Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi PM	
5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	Mengukur Persentase data dan informasi yang disajikan terkait perizinan dan penanaman modal	Mengelola dan menyajikan sejumlah data dan informasi terkait perizinan berusaha dan non berusaha	Persentase pengelolaan data dan sistem Informasi dalam setahun berjalan	Permendagri 86 Tahun 2017	Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	

Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja
Kabupaten Balangan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1	Realisasi investasi							45 M	47,25 M	10,06 M	9,39 M	42,88 M	27,99 M	216,47 M					62,2%	458,14%
2	Angka pengangguran terbuka					3,11%	2,80%	2,50%	2,55%		1,90%	2,34%	2,33%	2,46%		138,9%	116,43%	106,80%	96,47%	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMPISPTTK				82,73 Nilai	82,73 Nilai	83 Nilai	83 Nilai	86 Nilai	86,77 Nilai	83,25 Nilai	85,13 Nilai	93,85 Nilai	88,50 Nilai	104,89%	100,63%	102,57%	112,83%	102,91%	

Tabel T.C.24
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja
 Kabupaten Balangan

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Realisasi investasi	244.340.000	102.880.000	123.893.000	27.680.000	24.375.000	241.825.000	102.880.000	122.548.749	27.680.000	23.990.000	98,97%	100,00%	98,91%	100,00%	98,42%	114%	115%
Angka pengangguran terbuka	-	4.848.874.550	1.862.462.000	3.598.862.165	9.112.139.150	-	4.661.127.237	1.852.521.906	3.552.450.192	9.030.180.102		96,13	99,47	98,71	99,10	301%	310%
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMPTSPPTK	51.100.000	37.100.000	30.365.000	40.950.000	40.300.000	51.100.000	36.910.000	29.800.000	40.800.000	40.000.000	100,00%	99,49%	98,14%	99,63%	99,26%	291%	289%

Tabel T-C.25.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja

NO. (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	INDIKATOR (4)	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terwujudnya investasi daerah yang berkelanjutan	Meningkatnya investasi daerah	Realisasi investasi	227,29 M	238,65 M	250,59 M	263,12 M	276,27 M	290,09 M
2	Menurunnya angka pengangguran terbuka	Menurunnya angka pengangguran terbuka (TPT)	Angka pengangguran terbuka	2.46	2.43	2.40	2.37	2.34	2.30
3	Mewujudkan pelayanan perizinan yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMPPTSPTK	87	87,50	88	88,50	89	89,50

Tabel T-C.26.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026

VISI : MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA			
MISI II : Meningkatnya perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Terwujudnya investasi daerah yang berkelanjutan	1. Meningkatnya investasi daerah	1.1 Peningkatan kepastian hukum terkait investasi dan usaha	1.1. Meningkatkan promosi dan pengawasan investasi penanaman Modal asing dan dalam negeri
		1.2. Pemberian insentif dan fasilitasi investasi (berupa: insentif fiskal dan non fiskal) yang lebih selektif dan proses yang transparan	1.2. Peningkatan Investasi yang inklusif terutama dari investor domestik.
2. Meningkatkan daya saing tenaga kerja	2. Menurunnya angka pengangguran terbuka (TPT)	2.1. Meningkatkan tenaga kerja yang semakin berkualitas dan meningkatkan daya saing.	2.1. Melakukan kerjasama dengan pihak-pihak perusahaan penerima tenaga kerja
		2.2. Meningkatkan keahlian, keterampilan pencari kerja	2.2. Melakukan kerjasama dengan SKPD teknis dalam rangka pelatihan-pelatihan di bidang pertanian, perkebunan dan lainnya
		2.3. Meningkatkan kesempatan kerja terutama disektor informal serta dan mendorong produktivitas	2.3. Melakukan sosialisasi tentang ketenagakerjaan dan peningkatan kreativitas dan produktivitas LPK
MISI IV : Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
3. Mewujudkan pelayanan perizinan yang berkualitas	3. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	3.1. Penyederhanaan prosedur perizinan investasi dan usaha di pusat dan daerah, terutama untuk sektor pengolahan dan jasa	3.1. Menyederhanakan prosedur perizinan
		3.2. Pengembangan layanan investasi yang memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses perizinan bagi investor dan pengusaha	3.2. Mempersingkat waktu pelayanan
			3.3. Mengoptimalkan pelayanan perizinan berbasis online

Tabel T - C.27.
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi					
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)			
				2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
				2	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																				
Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP SKPD	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP SKPD	2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	62 (B)	62 (B)	63 (B)	65 (B)	67 (B)	68 (B)	69 (B)	69 (B)	69 (B)	53,213,713,734.00	12,658,440,894.00	12,658,440,894.00	12,658,440,894.00	12,658,440,894.00	12,658,440,894.00	53,213,713,734.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja		
							Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%										
				2	18	01	2.01		17,415,000.00	100%	100%	101,280,000.00	100%	106,828,000.00	100%	117,510,800.00	100%	129,261,880.00	100%	142,188,068.00	100%	142,188,068.00	100%	614,483,748.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
				2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100%	5,805,000.00	100%	11,900,000.00	100%	12,500,000.00	100%	13,750,000.00	100%	15,125,000.00	100%	16,637,500.00	100%	75,717,500.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
				2	18	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	16 dokumen	100%	5,805,000.00	100%	13,124,000.00	100%	13,781,000.00	100%	15,159,100.00	100%	16,675,010.00	100%	18,342,511.00	100%	82,886,621.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
				2	18	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	100%	6,184,000.00	100%	6,964,000.00	100%	7,660,400.00	100%	8,426,440.00	100%	9,269,084.00	100%	9,269,084.00	100%	38,503,924.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
				2	18	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	100%	10,404,000.00	100%	10,925,000.00	100%	12,017,500.00	100%	13,219,250.00	100%	14,541,175.00	100%	14,541,175.00	100%	61,106,925.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
				2	18	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	-	100%	6,184,000.00	100%	6,494,000.00	100%	7,143,400.00	100%	7,857,740.00	100%	8,643,514.00	100%	8,643,514.00	100%	36,322,654.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
				2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18 dokumen	100%	5,805,000.00	100%	47,300,000.00	100%	49,670,000.00	100%	54,637,000.00	100%	60,100,700.00	100%	66,110,770.00	100%	283,623,470.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
				2	18	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	100%	6,184,000.00	100%	6,494,000.00	100%	7,143,400.00	100%	7,857,740.00	100%	8,643,514.00	100%	8,643,514.00	100%	36,322,654.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja	

				2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100%	100%	2,726,751,196.00	100%	7,289,058,100.00	100%	7,790,926,000.00	100%	8,570,018,600.00	100%	9,427,020,460.00	100%	10,369,722,506.00	100%	46,173,496,862.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja
				2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang terlayakn gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan	70 bulan	100%	2,518,235,596.00	100%	6,894,449,300.00	100%	7,468,752,000.00	100%	8,215,627,200.00	100%	9,037,189,920.00	100%	9,940,908,912.00	100%	44,075,162,928.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja
				2	18	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase dokumen keuangan yang diverifikasi	60 bulan	100%	202,765,600.00	100%	358,320,000.00	100%	284,067,000.00	100%	312,473,700.00	100%	343,721,070.00	100%	378,093,177.00	100%	1,879,440,547.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja
				2	18	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Laporan Akuntansi dan Keuangan	-	100%	-	100%	7,684,000.00	100%	8,069,000.00	100%	8,875,900.00	100%	9,763,490.00	100%	10,739,839.00	100%	45,132,229.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja
				2	18	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Laporan Keuangan Akhir Tahun sesuai ketentuan perundang-undangan	-	100%	5,750,000.00	100%	7,684,000.00	100%	8,069,000.00	100%	8,875,900.00	100%	9,763,490.00	100%	10,739,839.00	100%	50,882,229.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja
				2	18	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Bahan Tanggapan Pemeriksaan	-	100%	-	100%	7,684,000.00	100%	8,069,000.00	100%	8,875,900.00	100%	9,763,490.00	100%	10,739,839.00	100%	45,132,229.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja
				2	18	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran sesuai ketentuan perundang-undangan	-	100%	-	100%	7,684,000.00	100%	8,069,000.00	100%	8,875,900.00	100%	9,763,490.00	100%	10,739,839.00	100%	45,132,229.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja
				2	18	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Laporan Prognosis Realisasi Anggaran sesuai ketentuan perundang-undangan	-	100%	-	100%	5,552,800.00	100%	5,831,000.00	100%	6,414,100.00	100%	7,055,510.00	100%	7,761,061.00	100%	32,614,471.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja
				2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	135,240,000.00	100%	281,900,000.00	100%	188,622,000.00	100%	207,484,200.00	100%	228,232,620.00	100%	251,055,882.00	100%	1,292,534,702.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja
				2	18	01	2.05	02	Pengadaan Pakaiannya Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaiannya dinas beserta perlengkapannya, Jumlah pakaiannya kedsarahan	339 stel	-	50 stel, 50 stel	-	37,500,000.00	50 stel, 50 stel	52,206,000.00	50 stel, 50 stel	57,426,600.00	50 stel, 50 stel	63,169,260.00	50 stel, 50 stel	69,486,186.00	250 stel, 250 stel	279,788,046.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja
				2	18	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	98 OK	100%	135,240,000.00	100%	244,400,000.00	100%	136,416,000.00	100%	150,057,600.00	100%	165,063,360.00	100%	181,569,696.00	100%	1,012,746,656.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja
				2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	100%	334,690,000.00	100%	263,381,400.00	100%	276,752,000.00	100%	304,427,200.00	100%	334,869,920.00	100%	368,356,912.00	100%	1,882,477,432.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja
				2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	151 buah	70 buah	15,000,000.00	84 buah	20,205,400.00	90 buah	21,217,000.00	100 buah	23,338,700.00	110 buah	25,672,570.00	120 buah	28,239,827.00	500 buah	133,673,497.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja
				2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	41 buah	-	3 buah	-	10,000,000.00	10 buah	10,500,000.00	10 buah	11,550,000.00	10 buah	12,705,000.00	10 buah	13,975,500.00	50 buah	58,730,500.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja
				2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	165,353	224 pak : 20000 lembar	33,000,000.00	262 pak : 40,000 lembar	35,616,000.00	244 pak : 50,000 lembar	37,397,000.00	254 pak : 60,000 lembar	41,136,700.00	264 pak : 70,000 lembar	45,250,370.00	274 pak : 80,000 lembar	49,775,407.00	1,270 pak : 300,000 lembar	242,175,477.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja
				2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	60 bahan bacaan	3 bahan bacaan	1,690,000.00	2 bahan bacaan	4,000,000.00	3 bahan bacaan	4,400,000.00	3 bahan bacaan	4,840,000.00	3 bahan bacaan	5,324,000.00	3 bahan bacaan	5,856,400.00	3 bahan bacaan	26,110,400.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja
				2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	264 Orang/hari	78 Orang/hari	285,000,000.00	182 orang/hari	193,560,000.00	252 orang/hari	203,238,000.00	252 orang/hari	223,561,800.00	252 orang/hari	245,917,980.00	252 orang/hari	270,509,778.00	1260 orang/hari	1,421,787,558.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja

2	18	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95 buah	7 paket	485,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja			
2	18	01	2.07	02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan	4 buah	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja		
2	18	01	2.07	05 Pengadaan Mebel	Jumlah Mebelur yang diadakan	42 buah	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja		
2	18	01	2.07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	6 paket	285,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja			
2	18	01	2.07	09 Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	1 paket	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja			
2	18	01	2.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	49 buah	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja		
2	18	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60 bulan	12 bulan	332,160,000.00	12 bulan	707,394,400.00	12 bulan	711,144,000.00	12 bulan	782,258,400.00	12 bulan	860,484,240.00	12 bulan	946,532,664.00	60 bulan	4,339,973,704.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	18	01	2.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 bulan	12 bulan	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	18	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terbayarnya tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 bulan	100%	127,200,000.00	100%	383,100,000.00	100%	402,255,000.00	100%	442,480,500.00	100%	486,728,550.00	100%	535,401,405.00	100%	2,377,165,455.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	18	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60 bulan	12 bulan	204,960,000.00	12 bulan	324,294,400.00	12 bulan	308,889,000.00	12 bulan	339,777,900.00	12 bulan	373,755,690.00	12 bulan	411,131,259.00	12 bulan	1,962,808,249.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	18	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60 bulan	12 bulan	186,880,000.00	12 bulan	432,590,000.00	12 bulan	436,202,000.00	12 bulan	479,822,200.00	12 bulan	527,804,420.00	12 bulan	580,584,862.00	60 bulan	2,643,883,482.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	18	01	2.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Kendaraan Dinas Operasional Layak Fungsi	3 buah	100%	150,800,000.00	100%	324,350,000.00	100%	340,568,000.00	100%	374,624,800.00	100%	412,087,280.00	100%	453,296,008.00	100%	2,055,726,088.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	18	01	2.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya layak fungsi	60 bulan	100%	27,280,000.00	100%	108,240,000.00	100%	95,634,000.00	100%	105,197,400.00	100%	115,717,140.00	100%	127,288,854.00	100%	579,357,394.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	18	01	2.09	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Layak Fungsi	-	100%	8,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,800,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja		

Terwujudnya Investasi Daerah yang berkelanjutan	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	Meningkatnya Investasi Daerah	Realisasi Investasi	2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Kerjasama Pemberdayaan Dunia Usaha	100%	2 kerjasama	2 kerjasama	2 kerjasama	2 kerjasama	2 kerjasama	2 kerjasama	2 kerjasama	12 kerjasama	890,826,557.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja							
								Jumlah Potensi Investasi Daerah yang dapat dikembangkan untuk dipromosikan		1 Potensi Investasi Daerah	1 Potensi Investasi Daerah	1 Potensi Investasi Daerah	1 Potensi Investasi Daerah	1 Potensi Investasi Daerah	1 Potensi Investasi Daerah	6 Potensi Investasi Daerah										
				2	18	02	2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Diberikan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	PERDA/Perbup mengenai pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0.00	1 draft Perbup	36,300,000.00	1 Perbup	102,591,000.00	1 draft Perda	112,850,100.00	1 PERDA	124,135,110.00	Reviu Perbup dan PERDA	136,548,621.00	6 Dokumen	512,424,831.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja			
				2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	0.00	1 draf SOP	36,300,000.00	1 draf SOP	52,591,000.00	1 SOP	57,850,100.00	1 Reviu SOP	63,635,110.00	1 Reviu SOP	69,998,621.00	5 dokumen	280,374,831.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja		
				2	18	02	2.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	0.00	1 laporan monitoring Evaluasi	0.00	1 laporan monitoring Evaluasi	50,000,000.00	1 laporan monitoring Evaluasi	55,000,000.00	1 laporan monitoring Evaluasi	60,500,000.00	1 laporan monitoring Evaluasi	66,550,000.00	5 laporan monitoring Evaluasi	232,050,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja		
				2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	3 dokumen	1 Dokumen Peta Potensi	219,200,000.00	1 Dokumen Peta Potensi	26,070,000.00	1 Dokumen Peta Potensi	28,686,000.00	1 Dokumen Peta Potensi	31,554,600.00	1 Dokumen Peta Potensi	34,710,060.00	1 Dokumen Peta Potensi	38,181,066.00	6 Dokumen Peta Potensi	378,401,726.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja
				2	18	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Review Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	3 dokumen	1 Dokumen Review RUPM	219,200,000.00	1 Dokumen Review RUPM	11,850,000.00	1 Dokumen Review RUPM	13,750,000.00	1 Dokumen Review RUPM	15,125,000.00	1 Dokumen Review RUPM	16,637,500.00	1 Dokumen Review RUPM	18,301,250.00	6 Dokumen Review RUPM	294,863,750.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja
				2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota Terupdate		1 Dokumen Peta Potensi	0.00	1 Dokumen Peta Potensi	14,220,000.00	1 Dokumen Peta Potensi	14,936,000.00	1 Dokumen Peta Potensi	16,429,600.00	1 Dokumen Peta Potensi	18,072,560.00	1 Dokumen Peta Potensi	19,879,816.00	6 Dokumen Peta Potensi	83,537,976.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Terwujudnya Investasi Daerah yang berkelanjutan	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	Meningkatnya Investasi Daerah	Realisasi Investasi	2	18	03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Persetujuan Investasi / Rencana Investasi	100%	200 M	0.00	200 M	65,640,000.00	210 M	68,923,000.00	220 M	75,815,300.00	230 M	83,396,830.00	240 M	91,736,513.00	1,1 T	385,511,643.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
				2	18	03	2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Promosi Investasi	3 kegiatan		0.00	4 Kegiatan	65,640,000.00	4 Kegiatan	68,923,000.00	4 Kegiatan	75,815,300.00	4 Kegiatan	83,396,830.00	4 Kegiatan	91,736,513.00	20 Kegiatan	385,511,643.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
				2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting		0.00	2 Kegiatan	16,650,000.00	2 kegiatan	17,483,000.00	2 kegiatan	19,231,300.00	2 kegiatan	21,154,430.00	2 kegiatan	23,269,873.00	10 kegiatan	97,788,603.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
				2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan pameran penanaman modal		0.00	2 kegiatan	48,990,000.00	2 kegiatan	51,440,000.00	2 kegiatan	56,584,000.00	2 kegiatan	62,242,400.00	2 kegiatan	68,466,640.00	10 kegiatan	287,723,040.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja	

Mewujudkan Pelayanan Perizinan Yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMP/SPPTK	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMP/SPPTK	2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	100%	100%	62,720,000.00	100%	133,400,000.00	100%	132,744,500.00	100%	146,018,950.00	100%	160,620,845.00	100%	176,682,929.50	100%	812,187,224.50	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
								Persentase Pelayanan Konsultasi dan Pengaduan sesuai SOP	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	100%
				2	18	04	2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan	100%	100%	62,720,000.00	100%	133,400,000.00	100%	132,744,500.00	100%	146,018,950.00	100%	160,620,845.00	100%	176,682,929.50	100%	812,187,224.50	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja
				2	18	04	2.01	01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	100%		0.00	650 izin	14,000,000.00	700 izin	14,700,000.00	750 izin	16,170,000.00	800 izin	17,787,000.00	850 izin	19,565,700.00	3750 izin	82,222,700.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja
				2	18	04	2.01	02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Persentase Izin yang dievaluasi	100%	100%	5,240,000.00	100%	22,490,000.00	100%	23,639,000.00	100%	26,002,900.00	100%	28,603,190.00	100%	31,463,509.00	100%	137,438,599.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja
				2	18	04	2.01	03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Persentase konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	100%	100%	40,300,000.00	100%	52,050,000.00	100%	51,765,000.00	100%	56,941,500.00	100%	62,635,650.00	100%	68,899,215.00	100%	332,591,365.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja
				2	18	04	2.01	04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Persentase Jenis Layanan Perizinan dan Non perizinan yang dilayani	100%	100%	17,180,000.00	100%	44,860,000.00	100%	42,640,500.00	100%	46,904,550.00	100%	51,595,005.00	100%	56,754,505.50	100%	259,934,560.50	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Terwujudnya Investasi Daerah yang berkelanjutan	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	Meningkatnya Investasi Daerah	Realisasi Investasi	2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	100%	289,225,000.00	100%	95,830,000.00	100%	92,252,000.00	100%	101,477,200.00	100%	111,624,920.00	100%	122,787,412.00	100%	813,196,532.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
				2	18	05	2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan investasi di Kabupaten	100%	100%	289,225,000.00	100%	95,830,000.00	100%	92,252,000.00	100%	101,477,200.00	100%	111,624,920.00	100%	122,787,412.00	100%	813,196,532.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja
				2	18	05	2.01	01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Penanaman Modal	3 dokumen	100 Laporan	20,251,200.00	100 Laporan	14,520,000.00	100 Laporan	15,341,000.00	100 Laporan	16,875,100.00	100 Laporan	18,562,610.00	100 Laporan	20,418,871.00	600 Laporan	105,968,781.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja
				2	18	05	2.01	02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang dibina	303 perusahaan	25 Pelaku Usaha	199,973,000.00	25 Pelaku Usaha	31,210,000.00	25 Pelaku Usaha	34,648,000.00	25 Pelaku Usaha	38,112,800.00	25 Pelaku Usaha	41,924,080.00	25 Pelaku Usaha	46,116,488.00	150 Pelaku Usaha	391,984,368.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja
				2	18	05	2.01	03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah monitoring Pelaku Usaha	57 dokumen	25 Pelaku Usaha	69,000,800.00	25 Pelaku Usaha	50,100,000.00	25 Pelaku Usaha	42,263,000.00	25 Pelaku Usaha	46,489,300.00	25 Pelaku Usaha	51,138,230.00	25 Pelaku Usaha	56,252,053.00	150 Pelaku Usaha	315,243,383.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Mewujudkan Pelayanan Perizinan Yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMP/SPPTK	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMP/SPPTK	2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	100%	100%	20,100,000.00	100%	145,910,000.00	100%	138,920,000.00	100%	152,812,000.00	100%	168,093,200.00	100%	184,902,520.00	100%	810,737,720.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
				2	18	06	2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Updating Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	100%	100%	20,100,000.00	100%	145,910,000.00	100%	138,920,000.00	100%	152,812,000.00	100%	168,093,200.00	100%	184,902,520.00	100%	810,737,720.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja
				2	18	06	2.01	01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan	66	6 Layanan Informasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	20,100,000.00	6 Layanan Informasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	145,910,000.00	6 Layanan Informasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	138,920,000.00	6 Layanan Informasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	152,812,000.00	6 Layanan Informasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	168,093,200.00	6 Layanan Informasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	184,902,520.00	36 Layanan Informasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	810,737,720.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Menurunnya Angka Pengangguran Terbuka	Angka Pengangguran Terbuka	Menurunnya angka pengangguran terbuka (PPT)	Angka Pengangguran Terbuka	2	07	02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu pada rencana Tenaga Kerja	0.00	30%	121,422,000	30%	100,000,000	30%	100,000,000	30%	100,000,000	30%	521,422,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja					
				2	07	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase Akurasi Proyeksi indikator dalam RTK	0.00	70%	121,422,000	70%	100,000,000	70%	100,000,000	70%	100,000,000	70%	100,000,000	70%	521,422,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja			
				2	07	02	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja	0.00	1 Dok	121,422,000	1 Dok	50,000,000	1 Dok	50,000,000	1 Dok	50,000,000	1 Dok	50,000,000	1 Dok	321,422,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja		
				2	07	02	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Dokumen evaluasi RTK													Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja			
				2	07	02	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah perusahaan yang mengikuti pembinaan penyusunan RTK mikro	0.00	0.00		10 perusahaan	50,000,000	10 perusahaan	50,000,000	10 perusahaan	50,000,000	10 perusahaan	50,000,000	40 perusahaan	200,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja		
				2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang kompeten/ bersertifikat kompetensi		4%	150,052,634.00	4%	1,878,645,100.00	4%	7,991,000,000.00	4%	8,568,500,000.00	4%	9,643,500,000.00	4%	8,884,000,000.00	4%	37,115,697,734.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
				2	07	03	2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase pencari kerja yang memiliki keterampilan berdasarkan kluster kompetensi		24%	111,572,634.00	24%	1,701,975,100.00	24%	7,721,000,000.00	24%	8,298,500,000.00	24%	9,373,500,000.00	24%	8,614,000,000.00	24%	35,820,547,734.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja
				2	07	03	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah paket pelatihan kluster kompetensi dan pelatihan berbasis masyarakat / Jumlah calon pencari kerja yang kompeten dan memiliki keterampilan	10 Paket Pelatihan / 160 orang	1 paket	111,572,634.00	1 Paket Pelatihan / 16 orang	321,668,750.00	19 Paket Pelatihan / 304 orang	2,906,000,000.00	19 Paket Pelatihan / 304 orang	3,145,000,000.00	19 Paket Pelatihan / 304 orang	3,197,000,000.00	25 Paket Pelatihan / 400 orang	4,485,000,000.00	84 Paket Pelatihan / 1,328 orang	14,166,241,384.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja
				2	07	03	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana LembagaPelatihan Kerja	Jumlah MoU dengan pihak ketiga	0.00	3 Paket Pelatihan	225,000,000.00	4 Paket Pelatihan	315,000,000.00	5 Paket Pelatihan	433,500,000.00	5 Paket Pelatihan	476,500,000.00	6 Paket Pelatihan	629,000,000.00	23 Paket Pelatihan	2,079,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja		
				2	07	03	03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Sarana Pelatihan BLK	0.00	100%	1,155,306,350.00	100%	4,500,000,000.00	100%	4,720,000,000.00	100%	5,700,000,000.00	100%	3,500,000,000.00	100%	19,575,306,350.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja		
				2	07	03	2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPKS yang terakreditasi	-	100%	38,480,000.00	100%	92,970,000.00	100%	95,000,000.00	100%	95,000,000.00	100%	95,000,000.00	100%	95,000,000.00	100%	511,450,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja
				2	07	03	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LKPS yang terakreditasi		2 LPK	38,480,000.00	3 LPK	92,970,000.00	2 LPK	95,000,000.00	2 LPK	95,000,000.00	2 LPK	95,000,000.00	2 LPK	95,000,000.00	13 LPK	511,450,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja
				2	07	03	2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktifitas	0.00	100%	83,700,000.00	100%	75,000,000.00	100%	75,000,000.00	100%	75,000,000.00	100%	75,000,000.00	100%	75,000,000.00	100%	383,700,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja
				2	07	03	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktifitas	0.00	100%	83,700,000.00	100%	75,000,000.00	100%	75,000,000.00	100%	75,000,000.00	100%	75,000,000.00	100%	75,000,000.00	100%	383,700,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja
				2	07	03	2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	0.00	0.00	0.00	100%	100,000,000.00	100%	100,000,000.00	100%	100,000,000.00	100%	100,000,000.00	100%	100,000,000.00	100%	400,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja
				2	07	03	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Data tingkat produktifitas total	-	-	0.00	0.00	100%	100,000,000.00	100%	100,000,000.00	100%	100,000,000.00	100%	100,000,000.00	100%	400,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja	

Menurutnya Angka Penganggaran Terbuka	Angka Penganggaran Terbuka	Menurutnya angka penganggaran terbuka (PPT)	Angka Penganggaran Terbuka	2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Tenaga Kerja di dalam dan luar negeri	64,25%	65%	35,750,000.00	65%	222,122,500.00	55%	1,035,000,000.00	60%	1,035,000,000.00	65%	1,035,000,000.00	65%	1,035,000,000.00	65%	4,397,872,500.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja		
				2	07	04	2.01	Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan pelayanan Antar Kerja	705 pencari kerja	250 orang	35,750,000.00	750 orang	222,122,500.00	750 orang	355,000,000.00	750 orang	355,000,000.00	750 orang	355,000,000.00	750 orang	355,000,000.00	3750 orang	1,677,872,500.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
				2	07	04	2.01	02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan pelayanan perantara kerja	705 orang	250 orang	35,750,000.00	750 orang	124,532,500.00	750 orang	150,000,000.00	750 orang	150,000,000.00	750 orang	150,000,000.00	750 orang	150,000,000.00	3750 orang	760,282,500.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja
				2	07	04	2.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi PencariKerja	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	0	0	0.0	0.0	30 peserta	80,000,000.00	30 peserta	80,000,000.00	30 peserta	80,000,000.00	30 peserta	80,000,000.00	150 peserta	320,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
				2	07	04	2.01	04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan ketenagakerjaan	0	0	0.0	5 orang	38,195,000.00	5 orang	65,000,000.00	5 orang	65,000,000.00	5 orang	65,000,000.00	5 orang	65,000,000.00	25 orang	298,195,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja
				2	07	04	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang terserap melalui kegiatan Padat Karya Produktif, TTG dan atau TKW Wirausaha Baru		0.0	20 orang	59,395,000.00	20 orang	60,000,000.00	20 orang	60,000,000.00	20 orang	60,000,000.00	20 orang	60,000,000.00	100 orang	299,395,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
				2	07	04	2.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan TenagaKerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LPTKS yang memiliki Izin/ terdaftar di Kabupaten Balangan		0.0		0.0	1 LPTKS	60,000,000.00	1 LPTKS	60,000,000.00	1 LPTKS	60,000,000.00	1 LPTKS	60,000,000.00	5 LPTKS	240,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
				2	07	04	2.02	02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah Penempatan /penyerapan tenaga kerja melalui LPTKS		0.0		0.0	100 Tenaga Kerja	60,000,000.00	100 Tenaga Kerja	60,000,000.00	100 Tenaga Kerja	60,000,000.00	100 Tenaga Kerja	60,000,000.00	400 Tenaga Kerja	240,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
				2	07	04	2.03		Jumlah LPTKS Aktif					1 LPTKS		1 LPTKS		1 LPTKS		1 LPTKS		4 LPTKS				
				2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah dokumen informasi pasar kerja	12 Dokumen	12 Dokumen	0.0	0.0	12 dokumen	385,000,000.00	12 dokumen	385,000,000.00	12 dokumen	385,000,000.00	12 dokumen	385,000,000.00	60 dokumen	1,540,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
				2	07	04	2.03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi InformasiPasar Kerja Online	Jumlah konten/ perangkat yang dikelola	1	1	0.0	0.0	1 aplikasi	70,000,000.00	1 aplikasi	70,000,000.00	1 aplikasi	70,000,000.00	1 aplikasi	70,000,000.00	1 aplikasi	280,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
				2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar KerjaOnline	Jumlah informasi lowongan dan ketersediaan tenaga kerja		0.0		0.0	50 lowongan	115,000,000.00	50 lowongan	115,000,000.00	50 lowongan	115,000,000.00	50 lowongan	115,000,000.00	20 lowongan	460,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
				2	07	04	2.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah perusahaan yang membuka lowongan kerja	3 Perusahaan	3 Perusahaan	0.0	0.0	7 Perusahaan	200,000,000.00	7 Perusahaan	200,000,000.00	7 Perusahaan	200,000,000.00	7 Perusahaan	200,000,000.00	37 lowongan	800,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
				2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PMI/ CPMI / Masyarakat yang mendapatkan layanan	10	10	0.0	0.0	150 orang	235,000,000.00	150 orang	235,000,000.00	150 orang	235,000,000.00	150 orang	235,000,000.00	600 orang	940,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
				2	07	04	2.04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi CalonPekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI dan aparat desa yang mendapatkan informasi (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)		0.0		0.0	150 orang	100,000,000.00	150 orang	100,000,000.00	150 orang	100,000,000.00	150 orang	100,000,000.00	600 orang	400,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
				2	07	04	2.04	02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang mendapatkan rekomendasi paspor dan ID TKI		0.0		0.0	3 orang	30,000,000.00	3 orang	30,000,000.00	3 orang	30,000,000.00	3 orang	30,000,000.00	12 orang	120,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
				2	07	04	2.04	03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah purna PMI dan keluarga yang mengikuti pelatihan kewirausahaan		0.0		0.0	20 orang	105,000,000.00	20 orang	105,000,000.00	20 orang	105,000,000.00	20 orang	105,000,000.00	80 orang	420,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja	

2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase PPHI yang difasilitasi		100%	56,560,000.00	100%	366,680,000.00	100%	624,000,000.00	100%	673,000,000.00	100%	739,500,000.00	100%	813,750,000.00	100%	3,273,490,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja
				Persentase perusahaan yang memiliki sarana hubungan industrial	100%															
			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	100%	100%	35,540,000.00	100%	110,620,000.00	100%	208,000,000.00	100%	230,000,000.00	100%	251,000,000.00	100%	278,100,000.00	100%	1,113,260,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja
			Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)			0.00		0.00	100%	50,000,000.00	100%	55,000,000.00	100%	60,500,000.00	100%	66,550,000.00	100%	232,050,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja
			Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)			0.00		0.00	100%	50,000,000.00	100%	55,000,000.00	100%	60,500,000.00	100%	66,550,000.00	100%	232,050,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja
			Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	100%	100%	35,540,000.00	100%	110,620,000.00	100%	108,000,000.00	100%	120,000,000.00	100%	130,000,000.00	100%	145,000,000.00	100%	649,160,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	100%	100%	21,020,000.00	100%	256,060,000.00	100%	416,000,000.00	100%	443,000,000.00	100%	488,500,000.00	100%	535,650,000.00	100%	2,160,230,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja
			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang telah membentuk LKS Bpatti	0	0	0.00	100%	216,850,000.00	100%	230,000,000.00	100%	240,000,000.00	100%	265,000,000.00	100%	290,000,000.00	100%	1,241,850,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja
			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	100%	100%	21,020,000.00	100%	39,210,000.00	100%	36,000,000.00	100%	38,000,000.00	100%	42,000,000.00	100%	46,000,000.00	100%	222,230,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja
			Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Rekapitulasi tahunan jumlah anggota serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan pada tahun n	1 dokumen		0.00		0.00	20 anggota serikat pekerja	50,000,000.00	20 anggota serikat pekerja	55,000,000.00	20 anggota serikat pekerja	60,500,000.00	20 anggota serikat pekerja	66,550,000.00	80 anggota serikat pekerja	232,050,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja
			Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang diberdayakan			0.00		0.00	1 LKS	50,000,000.00	1 LKS	55,000,000.00	1 LKS	60,500,000.00	1 LKS	66,550,000.00	4 LKS	232,050,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja
			Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	0	0	0.00		0.00	100%	50,000,000.00	100%	55,000,000.00	1.00	60,500,000.00	100%	66,550,000.00	100%	232,050,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigrasi	Rata-rata pendapatan warga transmigrasi per tahun	Meningkatnya taraf hidup masyarakat transmigrasi melalui usaha-usaha pemberdayaan ekonomi	Rata-rata pendapatan warga transmigrasi per tahun	3	32	03		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase warga transmigrasi yang terampil	0	8.00%	12,522,400.00	0.00%	0.00	16%	265,800,000.00	16%	292,380,000.00	16%	321,618,000.00	16%	353,779,800.00	72%	1,246,100,200.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Kawasan transmigrasi		
				3	32	03	2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah warga transmigrasi yang terampil	0	10 orang	12,522,400.00	0	0.00	20 orang	265,800,000.00	20 orang	292,380,000.00	20 orang	321,618,000.00	20 orang	353,779,800.00	90 orang	1,246,100,200.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Kawasan transmigrasi		
				3	32	03	2.01	01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Lintas Sektor dengan instansi yang berkaitan dengan ketransmigrasian	2 kali		0.00		0.00	3 Kali	15,000,000.00	3 Kali	16,500,000.00	3 Kali	18,150,000.00	3 Kali	19,965,000.00	12 Kali	69,615,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Kawasan transmigrasi		
				3	32	03	2.01	02 Penyajian Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Penyajian Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	0		0.00		0.00	1 SP	100,000,000.00	1 SP	110,000,000.00	1 SP	121,000,000.00	1 SP	133,100,000.00	4 SP	464,100,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Kawasan transmigrasi		
				3	32	03	2.01	04 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penempatan dan Pemindahan Transmigran	0		0.00		0.00	1 kali	50,000,000.00	1 kali	55,000,000.00	1 kali	60,500,000.00	1 kali	66,550,000.00	4 kali	232,050,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Kawasan transmigrasi		
				3	32	03	2.01	05 Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah frekuensi Kegiatan Penyuluhan	0	1 kali	12,522,400.00		0.00	2 Kali	50,800,000.00	2 Kali	55,880,000.00	2 Kali	61,468,000.00	2 Kali	67,614,800.00	8 Kali	248,285,200.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Kawasan transmigrasi		
				3	32	03	2.01	06 Pelatihan Transmigrasi	Persentase Kehadiran Warga yang diberi pelatihan	100%		0.00		0.00	100%	50,000,000.00	100%	55,000,000.00	100%	60,500,000.00	100%	66,550,000.00	100%	232,050,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Kawasan transmigrasi		
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigrasi	Rata-rata pendapatan warga transmigrasi per tahun	Meningkatnya taraf hidup masyarakat transmigrasi melalui usaha-usaha pemberdayaan ekonomi	Rata-rata pendapatan warga transmigrasi per tahun	3	32	04		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Lahan Usaha yang dikelola oleh warga transmigrasi	18.76%	19.12%	47,557,400.00	18.91%	226,457,000.00	19.05%	215,000,000.00	19.20%	215,000,000.00	19.35%	215,000,000.00	19.50%	832,667,000.00	19.50%	1,751,681,400.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Kawasan transmigrasi		
				3	32	04	2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Bertambahnya Lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan sosial dan ekonomi warga transmigrasi	63,80 ha	63,80 ha	47,557,400.00	0.5 ha	226,457,000.00	0.5 ha	215,000,000.00	0.5 ha	215,000,000.00	0.5 ha	215,000,000.00	0.5 ha	832,667,000.00	66.30 ha	1,751,681,400.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Kawasan transmigrasi		
				3	32	04	2.01	01 Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah frekuensi Kegiatan Penguatan SDM	4 Kali	1 Kali	5,617,400.00	2 Kali	50,730,000.00	2 Kali	15,000,000.00	2 Kali	15,000,000.00	2 Kali	15,000,000.00	2 Kali	15,000,000.00	2 Kali	15,000,000.00	2 Kali	116,347,400.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Kawasan transmigrasi
				3	32	04	2.01	02 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Sarana dan prasarana yang disediakan	11 Pkt	1 paket	41,940,000.00	2 Pkt	175,727,000.00	2 Pkt	200,000,000.00	2 Pkt	200,000,000.00	2 Pkt	200,000,000.00	2 Pkt	817,667,000.00	2 Pkt	1,635,334,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Kawasan transmigrasi		
												5,111,823,630.00		12,394,080,500.00		20,305,390,500.00		21,965,929,550.00		24,244,872,505.00		25,428,476,755.50		105,232,437,244.50				

Tabel T-C.28.
 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Realisasi investasi	216,47 M	227,29 M	238,65 M	250,59 M	263,12 M	276,27 M	1,26 T
2	Angka pengangguran terbuka	2,46%	2.46	2.43	2.40	2.37	2.34	2.34
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMPTSPPTK	88,50 Nilai	87	87,50	88	88,50	89	89

Formulir E.55
Evaluasi Hasil terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan
Periode Pelaksanaan Tahun 2020

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	6,126,387,100.00	100%	4,501,162,186.00	100%	946,605,700.00	48.40%	199,667,112.00	33.49%	182,862,536.00	5.26%	120,930,222.00	12.85%	435,126,807.00	100.00%	938,586,677.00	100%	5,439,748,863	100.00%	88.79%	DPMPTSP
		Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa surat menyurat dan kelengkapannya (lembar)	610	28.600.000.00	1.350	19.750.000.00	2.250	10.050.000.00	1.250	5.550.000.00	0	0.00	0	0.00	1000	4.500.000.00	2.250	10.050.000.00	3.600	29.800.000	590.16%	104.20%	DPMPTSP
		Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)	72	529.650.000.00	48	311.303.218.00	12	99.400.000.00	3	29.646.025.00	3	23.228.036.00	3	14.099.778.00	3	24.909.738.00	12	91.883.577.00	60	403.186.795	83.33%	76.12%	DPMPTSP
		Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan (bulan)	72	1.473.988.000.00	48	654.300.000.00	12	278.014.000.00	3	56.700.000.00	3	56.700.000.00	3	18.900.000.00	3	145.238.800.00	12	277.538.800.00	60	931.838.800	83.33%	63.22%	DPMPTSP
		Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor (bulan)	72	230.602.000.00	48	152.102.000.00	12	15.934.300.00	3	0.00	3	7.248.900.00	3	0.00	3	8.685.400.00	12	15.934.300.00	60	168.036.300	83.33%	72.87%	DPMPTSP
		Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor (Buah)	1.492	350.579.500.00	2.319	285.566.400.00	632	34.797.200.00	200	10.723.400.00	100	9.936.100.00	0	0.00	332	14.110.300.00	632	34.769.800.00	2.951	320.336.200	197.79%	91.37%	DPMPTSP
		Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (lembar)	31.092	436.732.600.00	97.902	284.073.600.00	67.451	44.221.500.00	32.760	9.828.000.00	23.568	18.619.300.00	3.672	5.808.800.00	7.451	9.965.400.00	67.451	44.221.500.00	165.353	328.295.100	531.82%	75.17%	DPMPTSP
		Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Buah)	96	128.905.000.00	105	82.707.000.00	46	15.628.700.00	30	4.691.300.00	5	2.925.900.00	0	0.00	11	8.011.500.00	46	15.628.700.00	151	98.335.700	158.95%	76.29%	DPMPTSP
		Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (bulan)	72	53.210.000.00	48	33.260.000.00	12	4.000.000.00	3	0.00	3	2.050.000.00	3	0.00	3	1.950.000.00	12	4.000.000.00	60	37.260.000	83.33%	70.02%	DPMPTSP
		Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman (bulan)	72	141.860.000.00	48	85.180.000.00	12	18.560.000.00	3	1.975.000.00	3	6.025.000.00	3	0.00	3	10.560.000.00	12	18.560.000.00	60	103.740.000	83.33%	73.13%	DPMPTSP
		Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (kegiatan)	146	2,107,400.000.00	189	2,155,399.968.00	75	300.000.000.00	15	74.593.387.00	10	45.069.300.00	30	78.361.644.00	20	101.975.669.00	75	300.000.000.00	264	2,455,399,968	182.07%	116.51%	DPMPTSP
		Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah (kegiatan)	204	644.860.000.00	339	437.520.000.00	315	126.000.000.00	15	5.960.000.00	27	11.060.000.00	9	3.760.000.00	264	105.220.000.00	315	126.000.000.00	654	563.520.000	320.59%	87.39%	DPMPTSP
Rata-rata capaian kinerja (%)																	15752.09	494522623.9		218.00%	82.39%			
Predikat kinerja																	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	TINGGI				

2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Baik	100%	2,748,473,000.00	100%	1,672,912,860.00	100%	359,704,000.00	20.00%	37,675,200	35.56%	94,171,800.00	15.56%	16,015,000.00	28.89%	205,766,000.00	100.00%	353,628,000.00	100%	2,026,540,860	100.00%	73.73%	DPMPTSP
	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas (buah)	7	656,000,000.00	4	101,250,000.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	4	101,250,000	57.14%	15.43%	DPMPTSP
	Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	49	97,650,000.00	49	97,650,000.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	49	97,650,000	100.00%	100.00%	DPMPTSP
	Kegiatan Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur (buah)	23	180,280,000.00	37	106,480,000.00	5	33,904,000.00	0	0.00	4	1,600,000.00	0	0.00	1	32,300,000.00	5	33,900,000.00	42	140,380,000	182.61%	77.87%	DPMPTSP
	Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor	Tersedianya Peralatan Kantor (buah)	13	62,150,000.00	10	97,510,000.00	6	36,250,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	36,200,000.00	6	36,200,000.00	16	133,710,000	123.08%	215.14%	DPMPTSP
	Kegiatan Pengadaan Komputer	Tersedianya Komputer (buah)	19	285,400,000.00	15	231,150,000.00	10	95,900,000.00	0	0.00	3	41,478,000.00	1	4,500,000.00	6	49,922,000.00	10	95,900,000.00	25	327,050,000	131.58%	114.59%	DPMPTSP
	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor (bulan)	48	93,660,000.00	24	355,937,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	24	355,937,000	50.00%	380.03%	DPMPTSP
	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (bulan)	72	970,033,000.00	48	460,385,860.00	12	126,650,000.00	3	32,675,200	3	29,518,800.00	3	11,515,000.00	3	52,119,000.00	12	125,828,000.00	60	586,213,860	83.33%	60.43%	DPMPTSP
	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	72	403,300,000.00	48	222,550,000.00	12	67,000,000.00	3	5,000,000	3	21,575,000.00	3	0.00	3	35,225,000.00	12	61,800,000.00	60	284,350,000	83.33%	70.51%	DPMPTSP
Rata-rata capaian kinerja (%)																		4660.00%	29434077200.00%	101.38%	129.25%		
Predikat kinerja																		SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI		
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur	100%	389,600,000.00	100%	267,000,000.00	100%	42,500,000.00	50.00%	20,000,000	0	0	0	0	50.00%	22,500,000.00	100.00%	42,500,000.00	100%	309,500,000	100.00%	79.44%	DPMPTSP
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya (stell)	230	186,700,000.00	140	140,500,000.00	45	22,500,000.00	0	0	0	0	0	0	45	22,500,000.00	45	22,500,000.00	185	163,000,000	80.43%	87.31%	DPMPTSP
	Pengadaan Pakaian KORPRI	Tersedianya pakaian KORPRI (stell)	63	28,000,000.00	38	19,000,000.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0.00	38	19,000,000	60.32%	67.86%	DPMPTSP
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu (stell)	190	91,700,000.00	85	50,500,000.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0.00	85	50,500,000	44.74%	55.07%	DPMPTSP
	Pengadaan pakaian kedaerahan	Tersedianya pakaian kedaerahan (stell)	170	83,200,000.00	114	57,000,000.00	40	20,000,000.00	40	20,000,000	0	0	0	0	0	-	40	20,000,000.00	154	77,000,000	90.59%	92.55%	DPMPTSP
Rata-rata capaian kinerja (%)																		115.5	77375000	69.02%	75.70%		
Predikat kinerja																		SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SEDANG	SEDANG		

4		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	1,236,535,000.00	100%	617,784,730.00	100%	145,000,000.00	25.00%	30,000,000.00	33.33%	42,250,000.00	0.00%	-	41.67%	72,400,000.00	100%	144,650,000.00	100%	762,434,730	100.00%	61.66%	DPMPTSP
		Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi yang Dilaksanakan (kegiatan)	16	201,685,000.00	16	201,685,000.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	16	201,685,000	100.00%	100.00%	DPMPTSP
		Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan(OK)	72	1,034,850,000.00	74	416,099,730.00	24	145,000,000.00	6	30,000,000.00	8	42,250,000.00	0	0	10	72,400,000.00	24	144,650,000.00	98	560,749,730	136.11%	54.19%	DPMPTSP
Rata-rata capaian kinerja (%)																				98	560749730	118.06%	77.09%	
Predikat kinerja																				SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	TINGGI	
5		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Predikat Akutabilitas dan Kinerja SKPD	100%	258,730,000.00	100%	234,410,637.00	100%	28,173,000.00	44.44%	3,290,400.00	22.22%	11,949,600.00	0.00%	0.00	33.33%	12,933,000.00	100.00%	28,173,000.00	100%	262,583,637	100.00%	101.49%	DPMPTSP
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Renja, Renja Perubahan, LAKIP, LPPD, Laporan Keuangan (dokumen)	21	194,200,000.00	11	195,930,637.00	5	14,001,000.00	3	1,495,900.00	1	4,984,100.00	0	0.00	1	7,521,000.00	5	14,001,000.00	16	209,931,637	76.19%	108.10%	DPMPTSP
		Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Tersusunnya RKA dan DPA DPMPTSP (dokumen)	22	64,530,000.00	14	38,480,000.00	4	14,172,000.00	1	1,794,500.00	1	6,965,500.00	0	0.00	2	5,412,000.00	4	14,172,000.00	18	52,652,000	81.82%	81.59%	DPMPTSP
Rata-rata capaian kinerja (%)																						79.00%	94.85%	
Predikat kinerja																				SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	TINGGI	SANGAT TINGGI	
6	Meningkatnya Investasi Daerah	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Kerjasama Pemberdayaan Dunia Usaha yang ditindaklanjuti	100%	1,651,888,500.00	100%	430,177,154.00	100%	1,493,072,000.00	0%	-	0%	29,737,000.00	80%	143,840,700.00	20%	1,295,517,300.00	100%	1,469,095,000.00	100%	1,899,272,154	100.00%	114.98%	DPMPTSP
		Peningkatan Kerjasama Strategis antar Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah	Terciptanya Kerjasama Strategis Antar Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah (MoU)	4	129,020,000.00	2	55,284,898.00	1	31,388,000.00	0	0.00	0	2,777,000.00	2	1,158,000.00	3	27,453,000.00	7	31,388,000.00	#REF!	86,672,898	#REF!	67.18%	DPMPTSP
		Pengembangan potensi unggulan daerah	Terlaksananya Ekspose tentang Potensi Unggulan Daerah (kegiatan)	12	297,150,000.00	2	27,540,000.00	2	1,352,924,000.00	0	0.00	0	0	1	142,682,700.00	1	1,186,734,300.00	2	1,329,417,000.00	4	1,386,967,000	33.33%	456.66%	DPMPTSP
		Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Tersusunnya RUPM dan Perbup Tata Cara Pemberian Insentif Kemudahan Berinvestasi di Daerah (dokumen)	4	534,949,500.00	2	148,849,200.00	1	55,300,000.00	0	0.00	0	0	0	1	54,830,000.00	1	54,830,000.00	#REF!	203,679,200	#REF!	38.07%	DPMPTSP	
		Penyelenggaraan Pameran Investasi	Pelaksanaan Pameran Investasi (kegiatan)	9	690,769,000.00	3	198,503,056.00	1	53,460,000.00	0	0.00	0	26,960,000.00	0	0	1	26,500,000.00	0	53,460,000.00	#REF!	251,963,056	#REF!	36.48%	DPMPTSP
Rata-rata capaian kinerja (%)																						#REF!	149.60%	
Predikat kinerja																						#REF!	SANGAT TINGGI	

7	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase Perusahaan yang menyampaikan LKPM (%)	100%	2.705.590.000.00	100%	883.310.875.00	100%	95.371.400.00	0%	0	84.62%	27.061.000.00	5.00%	0	10.38%	67175400	100.00%	94.236.400.00	100%	977.547.275	100.00%	36.13%	DPMPTSP
	Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur	Tersedianya Draft NSPK (dokumen)	0	-	0	-	0	0.00	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00%	0.00%	DPMPTSP
	Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi	Terlaksananya Sosialisasi tentang Insentif dan Kemudahan Berinvestasi (kegiatan)	1	24.450.000.00	1	24.450.000.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	1	24.450.000	100.00%	100.00%	DPMPTSP
	Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	Jumlah Data dan Informasi Penanaman Modal (dokumen)	4	635.240.000.00	2	202.789.458.00	1	59.050.000.00	0	0	0	0	0	0	1	58.300.000.00	1	58.300.000.00	3	261.089.458	75.00%	41.10%	DPMPTSP
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi Realisasi Investasi (dokumen)	4	162.135.000.00	2	45.895.000.00	1	11.946.400.00	0	0	0	10.371.000.00	0	0	1	1.575.400.00	1	11.946.400.00	3	57.841.400	75.00%	35.67%	DPMPTSP
	Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Perizinan	Jumlah Laporan Tim (kegiatan)	3	347.220.000.00	4	347.220.000.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	4	347.220.000	133.33%	100.00%	DPMPTSP
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang menyampaikan LKPM (Perusahaan)	40	1.067.585.000.00	31	150.228.749.00	11	24.375.000.00	0	0	11	16.690.000.00	6	0	6	7.300.000.00	23	23.990.000.00	54	174.218.749	135.00%	16.32%	DPMPTSP
	Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pelaku Usaha di Bidang Investasi	Jumlah Pelaku Usaha (sasaran) yang menerima sosialisasi (Pelaku Usaha)	400	468.960.000.00	303	112.727.668.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	303	112.727.668	75.75%	24.04%	DPMPTSP
Rata-rata capaian kinerja (%)																			99.75	151469318.8	99.01%	52.86%	
Predikat kinerja																			SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	RENDAH	
8	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	Jumlah sektor potensi sumber daya investasi (sektor)	100%	509.872.500.00	100%	285.708.700.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	285.708.700	100%	56.04%	DPMPTSP
	Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan investasi	Dokumen Kajian Investasi Kabupaten Balangan (dokumen)	1	270.900.000.00	1	270.900.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	270.900.000	100%	100.00%	DPMPTSP
	Penyusunan Profil Potensi Sumber Daya Investasi	Tersedianya Dokumen Profil Investasi Kabupaten Balangan (dokumen)	4	238.972.500.00	0	14.808.700.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.808.700	0%	6.20%	DPMPTSP
Rata-rata capaian kinerja (%)																			0.5	142854350	50.00%	53.10%	
Predikat kinerja																			SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH	RENDAH	
9	PENATAAN DAN PENGEMBANGAN DATA PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL	Tersedianya Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	100%	683.300.000.00	100%	290.688.803.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#REF!	290.688.803	#REF!	43%	DPMPTSP
	Pengembangan Aplikasi dan Sistem Informasi Pengelolaan Perizinan Secara Online	Aplikasi dan Sistem Informasi Pengelolaan Perizinan Secara Online (paket)	2	558.250.000.00	2	65.111.071.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#REF!	65.111.071	#REF!	12%	DPMPTSP
	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Teknologi	Pemeliharaan Aplikasi Perizinan dan Pengembangan Informasi Teknologi (IT) (aplikasi)	1	17.500.000.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#REF!		#REF!	0%	DPMPTSP
	Publikasi Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	Tersedianya Bahan Publikasi Informasi Perizinan dan Penanaman Modal (paket)	1	107.550.000.00	1	225.577.732.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#REF!	225.577.732	#REF!	210%	DPMPTSP
Rata-rata capaian kinerja (%)																			#REF!	36896267.67	#REF!	73.80%	
Predikat kinerja																			#REF!	SANGAT TINGGI	#REF!	SEDANG	

10		PROGRAM PENATAAN NSPK BIDANG PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL	Sinkronisasi dan Harmonisasi NSPK	100%	340,725,000.00	100%	379,345,649.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	379,345,649	100%	111.33%	DPMPTSP	
		Kajian NSPK Bidang Perizinan dan Penanaman Modal	Naskah Akademik NSPK (NSPK)	1	206,600,000.00	1	206,049,649.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	206,049,649	100%	99.73%	DPMPTSP	
		Desimilasi dan Sosialisasi NSPK Bidang Perizinan dan Penanaman Modal	Terlaksananya Sosialisasi Produk NSPK Bidang Perizinan dan Penanaman Modal (kegiatan)	8	106,625,000.00	8	141,796,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	141,796,000	100%	132.99%	DPMPTSP	
		Kodefikasi dan Dokumentasi NSPK Bidang Perizinan dan Penanaman Modal	Jumlah NSPK yang Didokumentasikan (NSPK)	6	27,500,000.00	6	31,500,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	31,500,000	100%	114.55%	DPMPTSP	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		5	126448549.7	100.00%	115.75%			
Predikat kinerja																		SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI			
11		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	110,045,000.00	100%	81,986,500.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	81,986,500	100%	74.50%	DPMPTSP	
		Penyusunan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Survey dan Tersusunnya Dokumen IKM (dokumen)	1	30,365,000.00	1	29,800,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	29,800,000	100%	98.14%	DPMPTSP	
		Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan	Pengaduan Masyarakat yang Ditangani dan terselesaikan (%)	100	79,680,000.00	100	52,186,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	52,186,500	100%	65.50%	DPMPTSP	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		50.5	40993250	100.00%	81.82%			
Predikat kinerja																		SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	TINGGI			
12	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	PENINGKATAN KUALITAS DAN KEMUDAHAN PERIZINAN	Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan	100%	1,768,485,200.00	100%	381,064,433.00	100%	62,431,000.00	51.13%	19,108,000	32.25%	7,740,000	8.00%	0	8.62%	30,980,900.00	100%	57,828,900.00	100%	438,893,333	100.00%	24.82%	DPMPTSP
		Penyediaan Jasa Teknis Perizinan	Jumlah Izin Yang diterbitkan (Buah)	2200	370,669,000.00	1,087	61,930,000.00	600	37,800,900.00	366	15,000,000	222	7,740,000	223	0	301	15,060,900.00	1112	37,800,900.00	2,199	99,730,900	99.95%	26.91%	DPMPTSP
		Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Perizinan	Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan	100	711,597,300.00	100	233,558,100.00	100	18,070,100.00	25	4,108,000	25	0	25	0	25	10,960,000.00	100	15,068,000.00	100	248,626,100	100.00%	34.94%	DPMPTSP
		Pembinaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Bidang Perizinan (Kegiatan)	5	311,874,450.00	1	84,976,333.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	1	84,976,333	20.00%	27.25%	DPMPTSP
		Peninjauan Lapangan untuk Syarat Teknis Pemberian Izin Usaha	Jumlah Izin Yang diterbitkan (Buah)	100	184,234,600.00	100	600,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	100	600,000	100.00%	0.33%	DPMPTSP
		Peninjauan Lapangan untuk Syarat Teknis Pemberian Izin Tertentu	Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan Jasa Usaha	100	190,109,850.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00%	0.00%	DPMPTSP
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan perizinan	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang harus dievaluasi (Buah)	100	193,105,400.00	50	4,700,000.00	100	6,560,000.00	13	0.00	11	0.00	44	0.00	45	4,960,000.00	113	4,960,000.00	163	9,660,000	163.00%	5.00%	DPMPTSP
Rata-rata capaian kinerja (%)																				80.49%	15.74%			
Predikat kinerja																				TINGGI	SANGAT RENDAH			

13	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	3,641,000,000.00	100%	296,030,000.00	100%	157,589,100.00	0%	0	5.56%	9,218,000.00	77.78%	0.00	17.00%	137,483,900.00	100%	146,701,900.00	100%	304,291,000	100.00%	8.36%	DPMPTSP																	
	Penyusunan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat (Dokumen)	3	340,599,000.00	1	40,800,000.00	1	40,300,000.00	0	0.00	0	0	0	0.00	1	40,000,000.00	1	40,000,000.00	2	80,300,000	66.67%	23.58%	DPMPTSP																	
	Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan	Jumlah Unit Penanganan Pengaduan (Unit)	3	466,048,000.00	1	28,800,000.00	1	5,400,000.00	0	0.00	0	0	0	0.00	1	5,400,000.00	0	5,400,000.00	1	10,800,000	33.33%	2.32%	DPMPTSP																	
	Pengembangan Aplikasi dan Sistem Informasi Pengelolaan Perizinan Secara Online	Jumlah Perizinan yang Akan Diproses Secara Online (paket)	6	508,382,900.00	2	82,490,000.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	2	0	33.33%	0.00%	DPMPTSP																	
	Publikasi Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	Jumlah Publikasi Informasi Perizinan dan Penanaman Modal (Informasi)	13	1,035,235,600.00	1	64,875,000.00	1	27,357,700.00	0	0.00	0	9,218,000.00	0	0.00	4	16,362,500.00	4	25,580,500.00	5	52,938,200	38.46%	5.11%	DPMPTSP																	
	Kajian NSPK Bidang Perizinan dan Penanaman Modal	Jumlah Naskah Akademik NSPK (NSPK)	3	711,815,500.00	0	0	1	48,000,000.00	0	0.00	0	0	0	0.00	1	39,190,000.00	1	39,190,000.00	1	87,190,000	33.33%	12.25%	DPMPTSP																	
	Desimilasi dan Sosialisasi NSPK Bidang Perizinan dan Penanaman Modal	Jumlah Sosialisasi Produk NSPK Bidang Perizinan dan Penanaman Modal (Kegiatan)	24	420,701,000.00	8	51,065,000.00	2	16,531,600.00	0	0.00	0	0	0	0.00	2	16,531,600.00	2	16,531,600.00	10	33,063,200	41.67%	7.86%	DPMPTSP																	
	Kodefikasi dan Dokumentasi NSPK Bidang Perizinan dan Penanaman Modal	Jumlah NSPK yang didokumentasikan (NSPK)	18	158,218,000.00	6	28,000,000.00	6	19,999,800.00	0	0.00	0	0	0	0.00	24	19,999,800.00	24	19,999,800.00	30	39,999,600	166.67%	25.28%	DPMPTSP																	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			7.285714	43470142.86	59.07%	10.91%																		
Predikat kinerja																			SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	RENDAH	SANGAT RENDAH																		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																			3,330,446,200.00	2	309,740,712.00	2	404,989,936.00	2	280,785,922.00	2	2,279,883,307	9	3,275,399,877											
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 14)																					100.00%	65.49%																		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 14)																					SANGAT TINGGI	RENDAH																		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Dengan Meningkatkan pelayanan perizinan untuk menarik minat investor																																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja: Masih ada beberapa jenis perizinan yang belum dilayani di PTSP																																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya:																																								

Disusun
Paringin, 30 Desember 2020
Kepala DPMPTSP
Kabupaten Balangan

Dievaluasi
Paringin, Januari 2021
Kepala Bappeda
Kabupaten Balangan

H. ABIJI, S.Pd, M.AP
NIP. 19690813 199412 1 002

Drs. YUS ALWI RACHIM, M.Pd
NIP. 19631211 198601 1 003

Tabel T-B.35.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Rendahnya dan kurang berkembangnya sektor ekonomi non tambang (ekonomi lokal)	Pertumbuhan Investasi yang Berfluktuasi dan Kualitas Investasi yang belum optimal	Investasi saat ini mengarah ke dua sektor utama yakni Pertambangan (untuk PMA) dan Jasa Lainnya (untuk PMDN). kedua sektor ini hingga saat ini hampir tidak memiliki keterkaitan ke depan maupun ke belakang (multipliernya terhadap kesejahteraan masyarakat rendah).
			Belum ada Peraturan Daerah yang membahas mengenai investasi (Kepastian Hukum Investasi)
			Belum memiliki KAPET (Kawasan Ekonomi Terpadu) yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk memasarkan investasi kepada Investor baik itu investor lokal maupun investor Asing
			Mal Pelayanan Publik dalam rangka memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/812/Kum TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026
PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengarahkan pelaksanaan program-program pembangunan guna terwujudnya tujuan pembangunan daerah Kabupaten Balangan, maka dipandang perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2021-2026 untuk menjabarkan Visi, Misi dan Tujuan, serta Sasaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Dan Kabupaten/Kota
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708-Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemukhtahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2021;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032 (Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 95);
20. Peraturan Daerah Kab. Balangan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2018)
21. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan
23. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026
24. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2021)
25. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor ... Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu satu Pintu, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026 PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN.

KESATU : Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2021-2026 pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengevaluasi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2021-2026 guna pelaksanaan penyusunan yang sesuai dengan tata aturan terbaru.;
 2. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2021-2026;
 3. Melakukan diskusi untuk memperoleh masukan dari pihak terkait lainnya demi kesempurnaan penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2021-2026;
 4. Bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Balangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, DPA Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal

BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 188.45/812/Kum TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026 PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026
PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN

No	Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1	Bupati Balangan	Pengarah 1
2	Wakil Bupati Balangan	Pengarah 2
3	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Ketua
4	Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Sekretaris
5	Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Anggota
6	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha	Anggota
7	Kepala Bidang Pengaduan, Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Anggota
8	Kepala Bidang Perencanaan dan Penempatan Tenaga Kerja	Anggota
9	Kepala Bidang Pembinaan Pelatihan Kerja, Produktivitas dan Hubungan Industrial	Anggota
10	Kepala Bidang Transmigrasi	Anggota
11	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Anggota
12	Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja	Anggota
13	Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja	Anggota
14	Staf Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Anggota

BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI